



PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING



STRATEGI KOLABORASI DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN

Dr (c) Richard Steven Patty, S.STP, MM.
Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si.
Prof. Dr. Ir. Ridwan Sala, M.Si.
Dr. Ir. Ihwan Tjolli, M.P



PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING



STRATEGI KOLABORASI DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN



Dr (c) Richard Steven Patty, S.STP, MM.
Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si.
Prof. Dr. Ir. Ridwan Sala, M.Si.
Dr. Ir. Ihwan Tjolli, M.P

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

1. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
2. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan Karya Ilmiah ilmu pengetahuan;
3. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
4. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun

STRATEGI KOLABORASI DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN

Penulis

Dr (c) Richard Steven Patty, S.STP, MM.
Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si.
Prof. Dr. Ir. Ridwan Sala, M.Si.
Dr. Ir. Ihwan Tjolli, M.P

Penerbit

PT. Radja Intercontinental Publishing



STRATEGI KOLABORASI DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN

Diterbitkan oleh:

PT. Radja Intercontinental Publishing

**PENERBIT PT. RADJA INTERCONTINENTAL
PUBLISHING**

(Grup Publikasi RADJA PUBLIKA)

SERTIFIKAT IKAPI



No.032/DIA/2023

Alamat Redaksi:

Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk, Dsn. Angsana,
Kota Lhokseumawe
Telp. 081269223511

Email:

pt.radja.intercontinental.publis@gmail.com

Isi diluar tanggung jawab percetakan
Hak Cipta Dilindungi Undang-undang Dilarang
memperbanyak karya tulis dalam bentuk dan dengan
cara apapun, tanpa ijin tertulis dari penerbit

STRATEGI KOLABORASI DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN

ISBN :
978-623-89138-1-7

Penulis :
Dr (c) Richard Steven Patty, S.STP, MM.
Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si.
Prof. Dr. Ir. Ridwan Sala, M.Si.
Dr. Ir. Ihwan Tjolli, M.P

Editor :
Muhammad Multazam, S.E., M.S.M., CPRM

Penyunting :
Rahmat Idhami, S.Tr.t

Desain sampul dan tata letak:
Rahmat Idhami, S.Tr.t
(Sumber Gambar: Freepik.com)

Tanggal Terbit:
Mei 2024

Jumlah Halaman :
116

Penerbit:



**PT. Radja Intercontinental
Publishing**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dengan berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Buku ini. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Pemberdayaan Masyarakat merupakan program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, keterampilan, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program.

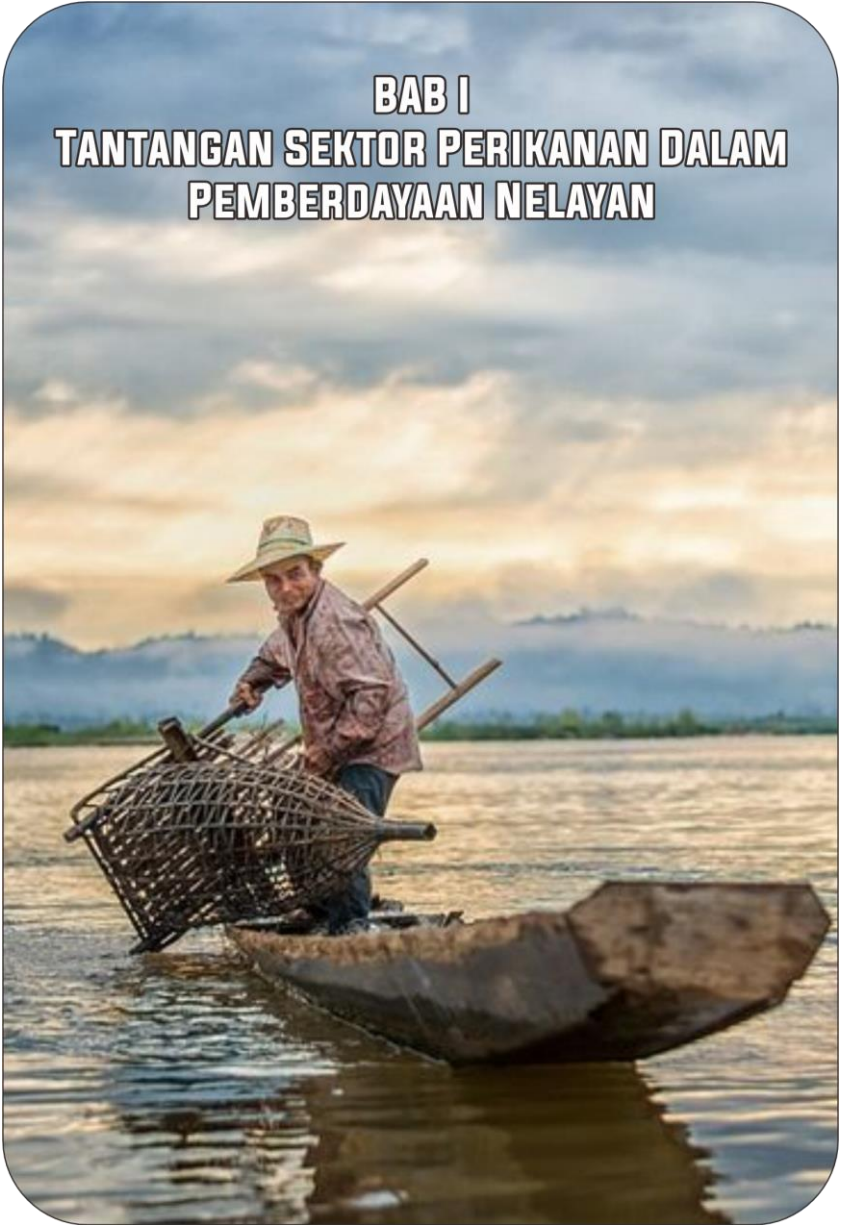
Dalam Penulisan buku ini, Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun penyajiannya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun bagi penulis. Akhirnya atas segala bantuan yang telah penulis terima, semoga mendapat balasan dari Allah SWT, dan penulis berharap Buku ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca pada umumnya.

Lhokseumawe, Mei 2024

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Peraturan Hak Cipta	ii
Halaman Sampul.....	iii
Halaman Penerbit.....	iv
Balik Halaman Judul.....	v
Alamat Redaksi.....	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Bab I Tantangan Sektor Perikanan Dalam Pemberdayaan Nelayan	1
Bab II Konsep Teori Perikanan Skala Kecil	11
Bab III Konsep Pemberdayaan.....	27
Bab IV Pemberdayaan Nelayan	42
Bab V Kolaborasi Stakeholder.....	58
Bab VI Implementasi <i>Collaboratif Governance</i> Dalam Pemberdayaan Nelayan	85
Daftar Pustaka	103
Profil Penulis.....	112

BAB I TANTANGAN SEKTOR PERIKANAN DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN



Sektor perikanan Indonesia mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor ini mempunyai potensi untuk menghasilkan berbagai macam hasil laut yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya secara berkelanjutan bagi negara dan masyarakat Indonesia. Potensi ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai \$1,338 miliar per tahun (KKP, 2020). Sektor ini otomatis berpotensi mempekerjakan 45 juta orang atau 40% dari total angkatan kerja Indonesia. Potensi tersebut didukung oleh luas laut 6,4 juta km² (hampir 70% luas wilayah Indonesia), terdiri dari laut teritorial (290.000 km²), perairan pedalaman dan kepulauan (3,11 juta km²), serta ZEE (3 juta km²). Selain itu, Indonesia juga memiliki perairan lain (270.000 km²), landas kontinen (2,8 juta km²), dan garis pantai seluas 108.000 km² (Biro Gedata dan Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Maritim Angkatan Laut Indonesia, 2018).

Kelestarian sumber daya ikan laut Indonesia ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perkiraan Potensi Sumber Daya Ikan yang Dapat Diterima antara Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tersebar sebanyak 12,54 juta ton.

Hasil tangkapan ikan dan luas pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, terdapat di 11 lokasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Nasional Republik Indonesia (WPPNRI).

Mengingat potensi sumber daya alam yang sangat besar, kegiatan penangkapan ikan memainkan peran penting sebagai sumber lapangan kerja dan penghidupan bagi masyarakat lokal dan sebagai sumber pendapatan bagi negara bagian dan daerah (Setiawan et al., 2007 dan The et al., 2011). Selain itu juga merupakan sumber protein hewani terutama untuk gizi masyarakat (Crilly dan Esteban, 2013).

Ketersediaan sumber daya perikanan dan lingkungan hidup sangat penting dalam menunjang kegiatan penangkapan ikan. Untuk menjaga daya dukung dan keberlanjutan stok ikan, maka daya dukung dan status stok ikan harus dikelola secara cermat berdasarkan strategi pengelolaan dan kelembagaan.

Wilayah pesisir memang merupakan wilayah yang dinamis, sangat strategis dan mempunyai potensi besar bagi pengembangan berbagai sektor perekonomian

khususnya sektor perikanan. Apabila sumber daya perikanan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal maka akan memberikan potensi ekonomi yang menjanjikan bagi masa depan masyarakat Indonesia.

Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan dan memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang diperoleh dari laut melalui penangkapan ikan dan budidaya. Meskipun merupakan wilayah yang potensial, namun pendapatan nelayan tersebut relatif rendah (Imron, 2003).

Sumber daya ikan memang berpotensi untuk dieksploitasi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, namun permasalahannya adalah nelayan yang tidak mampu meningkatkan hasil tangkapan sehingga meningkatkan pendapatannya, masih banyak. Itu tidak meningkat. Hal ini terjadi karena pendapatan mereka masih bergantung pada kondisi alam sehingga sulit mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Wahyono (2001) dan Kusnadi (2007) menemukan bahwa pendapatan nelayan dari melaut sangat berbeda dengan jenis usaha lain, seperti pedagang dan petani. Jika seorang pedagang dapat menghitung keuntungan yang

diperolehnya setiap bulannya, dan seorang petani juga dapat memperkirakan hasil panennya, maka tidak demikian halnya dengan seorang nelayan yang aktivitasnya penuh ketidakpastian.

Rendahnya pendapatan nelayan juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat nelayan itu sendiri. Rendahnya kesejahteraan nelayan akibat rendahnya pendapatan merupakan permasalahan umum khususnya bagi nelayan. Dalam kesehariannya, nelayan fokus pada pemenuhan kebutuhan hidupnya sendiri (subsisten).

Selain itu, terbatasnya pengetahuan nelayan mengenai pengelolaan hasil tangkapan menjadi kendala ketika hasil tangkapannya dijual atau diperdagangkan dalam bentuk ikan dalam jangka waktu tertentu.

Pemerintah sendiri belum begitu memahami situasi perekonomian dan tekanan yang dihadapi masyarakat di wilayah pesisir, khususnya nelayan. Pemerintah berupaya membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui adanya program pemberdayaan masyarakat.

Berbagai program pemberdayaan yang diklaim oleh pemerintah sebagai solusi untuk mengentaskan masalah kemiskinan nelayan nampaknya masih bias kepentingan, baik dari segi model maupun tahapannya. Target peningkatan kapasitas penangkapan melalui armada penangkapan dan teknologi alat tangkap yang diberikan melalui bentuk program pemberdayaan pemerintah kepada nelayan ternyata masih meninggalkan permasalahan yang mendasar.

Pemberdayaan Masyarakat merupakan program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, keterampilan, kesadaran, dan pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program.

Penguatan komunitas nelayan sendiri merupakan konsep yang dirancang untuk memperkuat kemandirian komunitas nelayan .

Pemberdayaan masyarakat nelayan meliputi peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui sosialisasi, pelatihan, pengembangan komunikasi,

koordinasi dan bimbingan melalui motivasi dan dukungan melalui penyediaan fasilitas.

Pasal 3 dan 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil mengatur tentang pemberian fasilitas oleh pemerintah melalui masyarakat.

Pengalaman Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dijalankan antara tahun 2001 hingga 2009 menjadi indikator bagaimana model pemberdayaan nelayan kurang berhasil. Pinjaman modal yang melibatkan koperasi nelayan setempat dan pihak perbankan tersebut pada akhirnya berhenti pada tahun 2009 tanpa ada indikasi perbaikan struktur ekonomi nelayan, salah satu alasan yang dikemukakan adalah karena pengembalian modal yang macet. Temuan Baihaqki (2008), menunjukkan bahwa kesalahan kredit macet bukan semata dikarenakan perilaku nelayan, namun lebih disebabkan faktor oknum aparat yang menyelewengkan dana hasil pengembalian (kredit) nelayan.

Program pemberdayaan masyarakat sebenarnya merupakan program yang dapat melibatkan dan

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Dari perspektif struktural, pemberdayaan nelayan merupakan upaya untuk memungkinkan terjadinya perubahan struktural dengan membebaskan nelayan dari ketergantungan pada aktor lain, baik pemerintah maupun juragan.

Dengan cara ini, nelayan dapat keluar dari jaringan kemiskinan yang membatasi mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Namun demikian, bukan berarti nelayan harus lepas dari relasi sosial yang mengikat mereka sebagai modal pengembangan kapasitas kelembagaan mereka. Artinya, program pemberdayaan juga diperlukan sebagai sarana membangun kohesi sosial dalam rangka pembangunan desa nelayan miskin.

Namun kenyataannya, pelaksanaan program pemberdayaan nelayan tidak mengubah struktur sosial ekonomi yang melingkupi kehidupan nelayan.

Dari pengalaman program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan pada tahun 2001 hingga 2009, masih menghadapi berbagai permasalahan. Hal ini termasuk rendahnya partisipasi

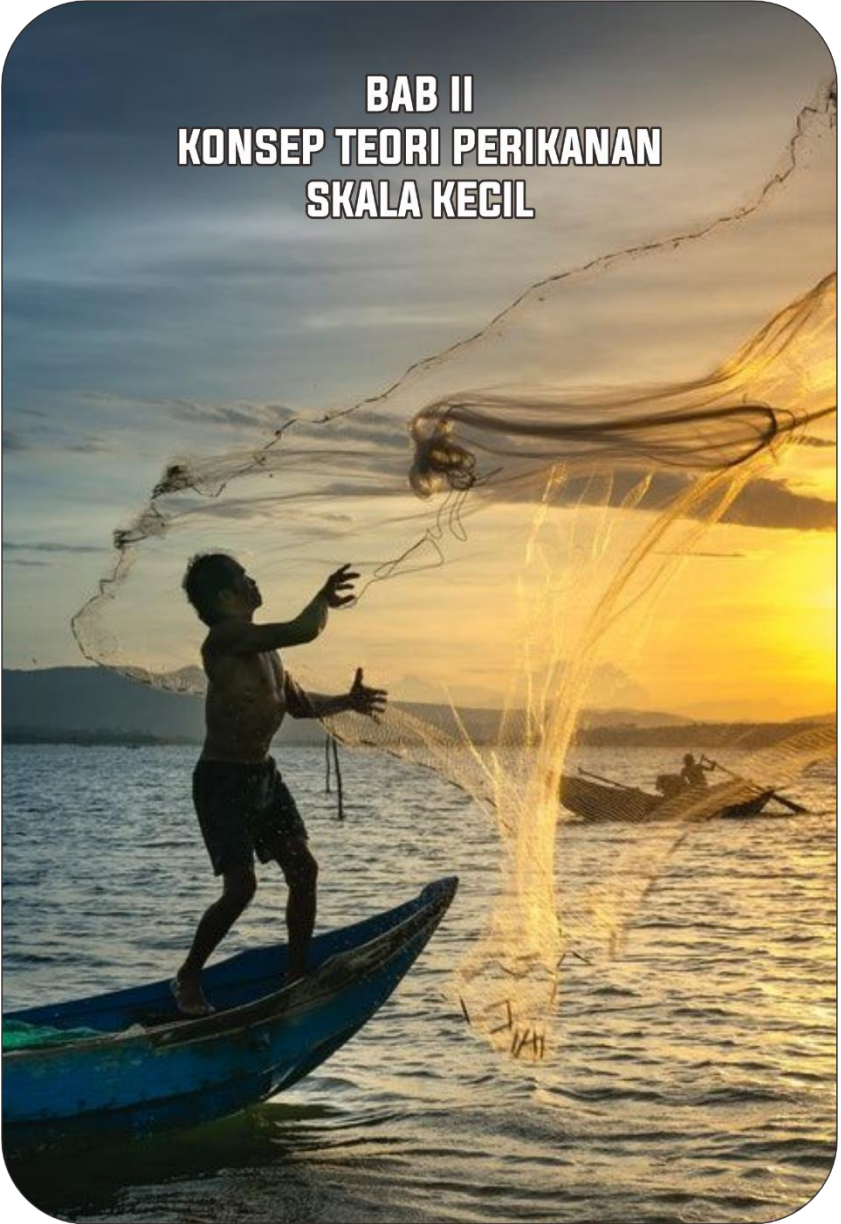
nelayan dalam program dan kurangnya kepercayaan antara nelayan dan pejabat pemerintah (Fernando, 2001).

Selain itu, masih terdapat bias elit dalam langkah dan tahapan implementasi program (Suadnya, I.W et al, 2004). Lemahnya pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program pemberdayaan juga menyebabkan kegagalan pelaksanaan program (Junaidi, 2003).

Pengelolaan pemberdayaan nelayan sudah berjalan dalam waktu yang lama. Tetapi pengelolaan pemberdayaan cenderung bersifat festival tahunan dan tidak berkelanjutan. Selain itu juga bersifat government-sentris di mana pemerintah menjadi pemain utama bahkan tunggal di dalam pengelolaan pemberdayaan tanpa melibatkan peran pihak non-government seperti swasta atau private sector. Pelibatan stakeholder yang lebih luas dituntut untuk pemberdayaan yang lebih optimal (Achyar et al., 2017; Shafique & Warren, 2018). Sehingga, menjadi suatu hal yang penting untuk mengetahui persepsi dari stakeholder tentang tata kelola pemberdayaan nelayan serta solusi di dalam tata kelola yang dapat mewujudkan kesejahteraan nelayan

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, Pengembangan Pemberdayaan Nelayan melalui pendekatan “Penerapan Model Kolaborasi Stakeholder Dalam Pemberdayaan Nelayan”.

BAB II **KONSEP TEORI PERIKANAN** **SKALA KECIL**



A. Perikanan Tangkap

Sumber daya perikanan adalah sumber daya alam yang tersedia secara bebas, yaitu sumber daya alam yang penambangannya tidak dibatasi, dan disebut juga sebagai sumber daya alam bersama karena setiap orang dapat secara bebas memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya perikanan ini milik semua orang, jadi tidak ada yang memilikinya. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa penangkapan ikan adalah segala kegiatan yang dilakukan dalam sistem usaha penangkapan ikan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan sediaan ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan hingga penjualan.

Penangkapan Ikan adalah kegiatan memperoleh ikan di perairan yang belum dibudidayakan, termasuk kegiatan memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan dengan menggunakan kapal penangkap ikan.

B. Konsep Perikanan Tangkap Skala Kecil

Sifat stok ikan yang bersifat open access yang mengakibatkan nelayan harus merantau untuk

mendapatkan hasil yang maksimal merupakan faktor risiko yang sangat tinggi (Satria, 2009). Menurut Polnak (1988), karakteristik perikanan skala kecil tumpang tindih dengan kegiatan budidaya dan beroperasi di daerah padat karya. Perikanan skala kecil juga dilihat dari kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), biasanya untuk pemenuhan sendiri (subsisten) yang sering disebut sebagai peasant fisher, yaitu karena alokasi hasil tangkapan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari daripada yang diinvestasikan kembali untuk pengembangan usaha (Satria, 2009).

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO, definisi perikanan skala kecil adalah sub-sektor perikanan yang dinamis dan berkembang yang membutuhkan kerja intensif dari penangkapan ikan hingga pemrosesan dan distribusi. Pekerjaan di sektor ini bersifat penuh waktu, paruh waktu, dan bahkan musiman. Tujuan mereka biasanya pasar domestik atau sekadar konsumsi mereka sendiri. Perikanan kecil, di sisi lain, umumnya menggunakan perahu listrik atau tidak ada motor sama sekali, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Mesin rata-rata kurang dari 5 grosson (GT).

Penangkapan ikan skala kecil telah memberikan kontribusi penting bagi kondisi ekonomi dan sosial nelayan. Hal ini sesuai dengan Wijaya (2013), khususnya di kawasan Asia-Pasifik, di mana perikanan skala kecil berkontribusi pada mata pencaharian setidaknya 357 juta orang. Melihat status Indonesia sebagai negara kepulauan, maka negara tersebut adalah negara berkembang. Secara geografis merupakan wilayah tropis, dengan keanekaragaman jenis ikan (multi-species) dan alat tangkap (multi-fishing gear), sehingga pengelolaan salvage fishing tidak sederhana, karena dari segi ekologi sangat kompleks. Perikanan Indonesia masih bercirikan perikanan skala kecil. Hal ini terlihat jelas pada komposisi armada penangkapan ikan yang sebagian besar masih menangkap ikan, dimana sekitar 85% dan hanya 15% merupakan penangkapan ikan skala besar. Dimana, struktur armada didominasi oleh kapal non motor sebesar 50%, kapal motor lepas pantai 26% dan kapal motor 2%. Armada kapal motor terbagi menjadi tiga ukuran yaitu kapal motor dengan dimensi kurang dari < 5 >10 GT dalam 1% (DKP 2005). Dominasi armada di bawah 10 GT menunjukkan bahwa penangkapan ikan secara manual memainkan peran yang sangat penting dalam penangkapan ikan di Indonesia.

Perikanan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Lebih dari 90% nelayan bekerja di sektor perikanan skala kecil (Crona et al. 2016; Pomeroy 2016). Diperkirakan 97% nelayan skala kecil ditemukan di negara kurang berkembang (Langdon, 2015).

Penangkapan ikan skala kecil memiliki karakteristik yang unik (Guyader et al. 2013). Secara tradisional, perikanan tangkap kecil memiliki karakteristik wilayah yang berbeda. Ciri khasnya adalah respon terhadap kondisi alam, sikap dan perilaku nelayan yang terlibat, kepemilikan armada dan alat tangkap, kemampuan mengelola keuangan, struktur sosial yang dibentuk oleh masyarakat nelayan, dan kelembagaan yang ada. Di sekitar mereka. Sulit untuk mengatur secara terpusat berbagai karakteristik perikanan kecil (García dan Heinen 2016).

Sedangkan menurut Smith (1983) dan Sembiring (2015) menyatakan bahwa perikanan tangkap skala kecil memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kegiatan dilakukan di unit penangkapan ikan kecil, kadang-kadang dengan atau tanpa perahu listrik.

- b. Kegiatan penangkapan ikan bersifat paruh waktu dan penghasilan keluarga dapat ditambah dengan penghasilan lain selain perikanan.
- c. Perahu dan alat tangkap biasanya dioperasikan secara mandiri.
- d. Alat tangkap dibuat sendiri dan dioperasikan tanpa bantuan mekanik.
- e. Investasi rendah dengan modal pinjaman dari daerah penangkapan ikan.
- f. Hasil tangkapan dan produktivitas per unit usaha pada tingkat sedang hingga sangat rendah.
- g. Hasil tangkapan tidak dijual ke pasar besar yang terorganisir dengan baik, tetapi didistribusikan di tempat pendaratan atau dijual di laut.
- h. Sebagian atau seluruh hasil tangkapan dapat dimakan sendiri bersama keluarganya.
- i. Komunitas nelayan kecil seringkali terisolasi secara geografis dan sosial, dan standar hidup keluarga nelayan dijaga agar tetap minimum.

Hasil tangkapan kecil seringkali terpisah secara geografis dan secara politis jauh dari pusat pengambilan keputusan. Berbagai macam sektor perikanan yang umum di daerah tropis membuatnya lebih sulit untuk mengelola

perikanan skala kecil daripada di negara-negara utara yang kurang kompleks secara ekologis. Otoritas perikanan di negara berkembang mungkin memiliki kapasitas terbatas untuk mengelola tangkapan kecil. Kurangnya kapasitas ini disebabkan oleh penggunaan metode pengelolaan perikanan tradisional yang dikembangkan di negara maju yang tidak sesuai untuk perikanan tangkap skala kecil.

C. Konsep Perikanan Tangkap Bagan

Bagan tergolong alat tangkap pasif, dan keberhasilan operasi penangkapan sangat tergantung pada cahaya yang digunakan. Fungsi cahaya di sini adalah untuk menarik spesies ikan positif-fototaktik dan membawanya lebih dekat ke peta. Penggunaan lampu untuk menangkap ikan pada awalnya terbatas pada area tertentu dan biasanya hanya dioperasikan di pantai pantai dengan jaring penarik, jaring gayung, dan pancing ulur. Pada tahun 1953, dengan berkembangnya jaring kerekan ikan, perkembangan lampu pancing berkembang pesat. Sampai dengan saat ini, penggunaan lampu penerangan tidak hanya digunakan di daerah pesisir tetapi juga di daerah lepas pantai, dan penggunaannya memenuhi

persyaratan perairan sebagai berikut: Payangia, pukut cincin, dll.

Penggunaan cahaya (lampu) untuk penangkapan ikan di Indonesia dan siapa yang memperkenalkannya belumlah jelas. Meskipun demikian di daerah-daerah perikanan Indonesia Timur, khususnya dimana usaha penangkapan cakalang dengan pole and line dilakukan sekitar tahun 1950 ditemukan kurang lebih 500 buah lampu petromaks yang digunakan untuk penangkapan, dimana tempat-tempat lain belum digunakan (Subani, 1983). Bagan adalah jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan domestik untuk menangkap ikan pelagis kecil, pertama kali diperkenalkan oleh nelayan Bugis-Makassar pada tahun 1950-an. Apalagi dalam waktu yang relatif singkat, alat tangkap sudah dikenal di seluruh Indonesia (Sudirman, et.al, 2011).

1. Klasifikasi Bagan

Baskoro dan Suherman (2007) mengklasifikasikan grafik menjadi dua kategori: grafik tancap dan grafik mengambang. Karena bagn tancap merupakan bagan yang dapat dipasang dengan cara menenggelamkan rangka badan, maka posisi

bagan tancap hanya dapat ditanam satu kali dan tidak dapat dipindah-pindah pada saat musim mancing. Penangkapan ikan pada bagan dilakukan pada malam hari. Beberapa orang menggunakan lampu, tetapi kebanyakan menggunakan lampu Petromax. Menurut Sudirman dan Mallawa (2012), ada tiga kategori grafik.

a) Bagan Tancap

Bagan tancap adalah deretan atau susunan bambu persegi panjang yang didorong untuk berdiri kokoh di atas air dengan jaring dipasang di tengah struktur. Dengan kata lain, alat tangkap ini tidak bergerak. Hal ini dikarenakan kedalaman laut yang digunakan sangat terbatas karena alat tangkap ditancapkan ke dasar air yang dangkal.

b) Bagan rakit

Jenis bagan lain yang sangat sederhana dan umum digunakan oleh para nelayan khususnya di sungai dan muara adalah rakit. Bagan ini terbuat dari bambu dengan operasi bergerak. Proses operasipenangkapannya sama dengan bagan tancap.

c) Bagan Perahu (Bagan Rambo)

Bagan ini juga dikenal sebagai bagan perahu listrik. Ada berbagai ukuran, tetapi di Sulawesi Selatan, jaring dengan panjang total 45 m dan lebar 45 m biasa digunakan. Jaring ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran mata jaring 0,5 cm dan terbuat dari bahan jaring. Selama beroperasi, Bagan dilengkapi dengan perahu motor untuk menjaga bagan rambo di daerah penangkapan ikan. Selain itu, peta laut berfungsi sebagai alat transportasi hasil tangkapan dari fishing ground ke fishing base.

Selain itu, Suhandi dan Sugiarti (2003) mengklasifikasikan jenis sarana produksi perikanan menjadi tiga jenis sebagai berikut.

1. Bagan tancap, yaitu kayu nibun dan bambu yang langsung dibuang ke laut. Di bagian atasnya dibangun gubuk sebagai tempat berteduh bagi para nelayan Bagan. Jaring dipasang di bawah gubuk sebagai perangkap ikan, dan lampu Pathomax digantung untuk menarik perhatian ikan.

2. Bagan Kambang dan bangunannya sama dengan bagan tancap, tetapi karena bagan kambang hanya menggunakan drum yang mengapung di permukaan laut, bangunan ini dapat dipindahkan lebih dari satu tempat saja.
3. Bagan dua perahu memiliki bentuk yang sama dengan 2 jenis bagan di atas, hanya saja bahan dasarnya adalah dua perahu.

Beberapa contoh dan jenis bagan digunakan di beberapa area, antara lain.

- a. Bagan perahu cangkil banyak digunakan di wilayah pesisir Teluk Lampung. Ini adalah versi terbaru dan lebih baik dari alat tangkap awal yang dibuat (Bagan tancap, bagan boat, bagan drigen) (Areta et. al., 2016).
- b. Di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan, bagan ini menggunakan istilah *pete-pete* karena memiliki motor penggerak sendiri yang tidak dimiliki bagan lain, sehingga dapat dengan cepat berpindah atau pergi ke

tempat penangkapan, dan dapat kembali dengan cepat (Sulaiman et.al., 2015).

2. Daerah/Wilayah Penangkapan Bagan

Pada umumnya jaring ikan dioperasikan di perairan subur yang selalu tenang dan kurang rentan terhadap gelombang besar, angin kencang, dan pasang surut air laut. Perairan yang dimaksud banyak terdapat di perairan teluk (Subani, 1970, Fathur, 2008).

Sasmita (1997) menyatakan bahwa daerah penangkapan ikan dengan bagan umumnya berada di perairan dekat pulau dan teluk serta di perairan yang tenang. Di sisi lain, di daerah dengan pasang surut yang kuat, nelayan di bagan tidak diizinkan untuk menangkap ikan di sana. Bagan perahu tersebar hampir di setiap daerah penangkapan ikan laut di Indonesia. Misalnya Morotai, Teluk Tomini, Pal, Luuk, Teluk Bourne (Subani dan Barus, 1989).

Daerah penangkapan bagan atau area operasi pemasangan bagan berada di perairan jernih dan perairan pantai hingga kedalaman 7-10 meter. Jarak ke pantai adalah 2 mil. Ada sekitar 200-300 meter antara satu bagan dengan bagan lainnya.

Dasar danau dipilih sebagai daerah berlumpur dengan pasir (untuk memudahkan pemasangan geladak (Mulyono, 1986) Seperti halnya bagan perahu, kedalaman daerah penangkapan ikan di Bagan atau daerah operasi adalah 27- 32,8 meter.

Peraturan Menteri Perikanan Kelautan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, Pasal 3 menyatakan bahwa jalur penangkapan ikan terdiri dari tiga jalur pancing yang menyatakan demikian.

- 1) Jalur Penangkapan I menurut huruf a dalam ayat 3 terdiri dari:
 - a) Alur Penangkapan Ikan IA meliputi perairan sampai dengan 2 mil laut, diukur dari garis pantai sampai ke laut lepas dan/atau perairan kepulauan. dan
 - b) Fishing Lane IB mencakup hingga 4 mil laut di luar Fishing Lane IA.
- 2) Jalur Penangkapan Ikan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) (b), meliputi

perairan di luar Jalur Penangkapan Ikan I sampai dengan 12 mil laut.

- 3) Alur Penangkapan Ikan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi perairan di luar Alur Penangkapan Ikan I dan Alur Penangkapan Ikan II termasuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Pada pasal 29 ayat (2) Bagan berperahu atau bagan apung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e angka 2 merupakan API yang bersifat pasif dan dioperasikan dengan menggunakan:

- a. ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, kecuali ukuran mata jaring bagan berperahu teri ≥ 4 (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter dioperasikan sesuai musim Penangkapan Ikan teri, panjang ≤ 12 (kurang dari atau sama dengan dua belas) meter, dan lebar ≤ 12 (kurang dari atau sama dengan dua belas) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 2.000 (kurang dari atau sama dengan dua ribu) watt, dan kapal motor berukuran ≤ 5 (kurang dari atau sama dengan lima) gross tonnage termasuk bagan apung

tanpa kapal pada Jalur Penangkapan Ikan IB dan Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI;

- b. ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, kecuali ukuran mata jaring bagan berperahu teri ≥ 4 (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter dioperasikan sesuai musim Penangkapan Ikan teri, panjang ≤ 20 (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, dan lebar ≤ 20 (kurang dari atau sama dengan dua puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 2.000 (kurang dari atau sama dengan dua ribu) watt, dan kapal motor berukuran > 5 (lebih dari lima) gross tonnage sampai dengan 10 (sepuluh) gross tonnage pada Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI;
- c. ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, kecuali ukuran mata jaring bagan berperahu teri ≥ 4 (lebih dari atau sama dengan empat) milimeter dioperasikan sesuai musim Penangkapan Ikan teri, panjang ≤ 30 (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, dan lebar ≤ 30 (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 2.000 (kurang dari atau sama dengan dua ribu) watt, dan

kapal motor berukuran >10 (lebih dari sepuluh) gross tonnage sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage Jalur Penangkapan Ikan II di semua WPPNRI; dan

- d. Ukuran mata jaring ≥ 1 (lebih dari atau sama dengan satu) inci, panjang ≤ 30 (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, dan lebar ≤ 30 (kurang dari atau sama dengan tiga puluh) meter, ABPI berupa lampu dengan total daya ≤ 16.000 (kurang dari atau sama dengan enam belas ribu) watt, dan kapal motor berukuran >30 (lebih dari tiga puluh) gross tonnage pada Jalur Penangkapan Ikan III di semua WPPNRI.

BAB III KONSEP PEMBERDAYAAN



A. Teori Pemberdayaan

Secara konseptual, kata Pemberdayaan berasal dari kata "kekuatan". Artinya kekuasaan atau pemberdayaan. Oleh karena itu, gagasan utama pemberdayaan terkait dengan konsep kekuasaan. Paksaan sering dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan dan terlepas dari keinginan dan kepentingan mereka (Edi Suharto, 2017). Pemberdayaan sebagai proses perubahan memiliki istilah yang bermakna. Dengan kata lain, proses pemberdayaan potensi tergantung pada dua hal.

- a) Kekuasaan ini dapat berubah. Pemberdayaan tidak pernah mungkin terjadi ketika kekuasaan tidak dapat diubah.
- b) Gaya ini dapat diperpanjang. Konsep ini menekankan gagasan menjadi dinamis daripada statis.

Pada dasarnya istilah pemberdayaan dalam wacana pengembangan masyarakat selalu dikaitkan dengan istilah kemandirian, partisipasi, jejaring, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan didasarkan pada kekuatan individu dan tingkat sosial.

Zubaedi (2013) menyatakan bahwa konsep pemberdayaan erat kaitannya dengan dua konsep utama: konsep kekuasaan (power) dan konsep ketidakberuntungan (inequality). Pengertian pemberdayaan dapat dijelaskan dari empat perspektif: pluralisme, elitisme, strukturalisme, dan poststrukturalisme. Hikmat, (2006) menyatakan bahwa pemberdayaan didefinisikan sebagai pemahaman psikologis tentang dampak kontrol individu terhadap kondisi sosial, kekuatan politik, dan hak-hak hukumnya. Mardikanto et. al , (2013) mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan individu, kelompok, dan masyarakat luas, sehingga aksesibilitas terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaan, kegiatan sosial, dll. Sementara itu, Sidi (2014) menyatakan bahwa pemberdayaan memiliki arti suatu proses pemberdayaan, kekuatan, atau kemampuan. Proses pemberian kekuasaan di sini dilakukan oleh pihak lain selain pihak yang tidak berdaya. Pemberdayaan tidak dapat diartikan sebagai pihak yang tidak berdaya yang tidak memiliki kekuatan sama sekali, tetapi harus meningkatkan kekuatan yang dimilikinya.

Suharto (2005) berpendapat bahwa pemberdayaan berarti memenuhi kebutuhan dasar sehingga orang, terutama kelompok rentan dan rentan, bebas dalam arti (a) tidak hanya kebebasan berbicara, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan dan rasa sakit. (b) mengakses sumber daya produktif yang meningkatkan pendapatannya dan memungkinkan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka. Selain pengertian di atas, pemberdayaan masyarakat juga dapat dipahami secara konseptual sebagai upaya mengangkat harkat dan martabat sebagian masyarakat yang tidak dapat lepas dari jebakan kemiskinan dan keterbelakangan dalam situasi saat ini. Dengan kata lain, pemberdayaan berarti memberdayakan dan memberdayakan masyarakat. Dalam konsep pemberdayaan, masyarakat adalah subyeknya sendiri. Proses pemberdayaan menekankan pada proses pemberdayaan masyarakat dan mendorong atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk mengambil keputusan tentang pilihan hidupnya (Syafri et. al., 2014).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam, pada pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Suharto Edi, 2010).

Jadi menurut defenisi-defenisi dari para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa pemberdayaan adalah upaya memberdayakan individu dan kelompok untuk bertanggung jawab atas tindakannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

B. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuatan masyarakat, terutama kelompok lemah yang tidak berdaya karena kondisi internal atau eksternal (adanya ketidakadilan dalam struktur sosial). Suharto (2010) Pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat, terutama kelompok rentan dan rentan, dan dapat memiliki kekuatan dan kemampuan, terutama dalam kaitannya dengan:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar mereka sehingga mereka memiliki kebebasan. Anda tidak hanya akan bebas untuk mengekspresikan pendapat Anda, tetapi Anda juga akan bebas dari kelaparan, ketidaktahuan, dan rasa sakit.

- b. Mencapai sumber yang produktif dimana mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka sehingga mereka bisa mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhinya.

C. Indikator Keberdayaan

Keefe Suharto (2006) menyatakan bahwa pemberdayaan mencakup tiga aspek: kemampuan manusia, kemampuan sosial-politik, dan kemampuan partisipasi. Eksistensi Indikator Pemberdayaan Dalam rangka menentukan secara operasional fokus dan tujuan pemberdayaan, perlu diketahui berbagai indikator pemberdayaan yang dapat menunjukkan apakah seseorang diberdayakan.

Dalam program pemberdayaan sosial, untuk membantu fokus pada aspek tujuan perubahan yang perlu dioptimalkan untuk semua upaya (misalnya keluarga miskin). Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dinilai dari pemberdayaan dalam hal kemampuan finansial, akses terhadap layanan sosial, dan keterampilan

budaya dan politik. Ketiga dimensi ini terkait dengan empat dimensi kekuasaan: Power Inside, Power Toe, Power Over, dan Power With. Menurut Schuler, Hashemi dan Riley dari Edi Suharto (2010) telah mengembangkan delapan indikator pemberdayaan:

- a. Kebebasan bergerak: Kemampuan seseorang untuk pindah dari rumah atau tempat tinggalnya. Misalnya, pasar, fasilitas kesehatan, bioskop, tempat ibadah, rumah terdekat. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika seseorang dapat berjalan sendiri.
- b. Kemampuan membeli barang-barang kecil: Kemampuan individu untuk membeli kebutuhan keluarga (beras, gula, minyak goreng, rempah-rempah). Kebutuhan pribadi (sabun, sampo, bedak, parfum). Seseorang dianggap mampu melakukan aktivitas ini, apalagi jika dia dapat mengambil keputusan sendiri tanpa meminta izin dari pasangannya. Apalagi jika dia membeli barang-barang tersebut dengan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan untuk membeli barang-barang besar: Kemampuan seseorang untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier. TV, HP, lemari

pakaian, kulkas, dll. Seseorang dianggap mampu melakukan aktivitas ini, apalagi jika dia dapat mengambil keputusan sendiri tanpa meminta izin dari pasangannya. Apalagi jika dia membeli barang-barang tersebut dengan uangnya sendiri.

- d. Terlibat dalam keputusan rumah tangga: Keputusan keluarga dapat dibuat sendiri atau bersama suami atau istri. Misalnya, merenovasi apartemen, membeli ternak, mendapatkan kredit usaha, dan lain sebagainya.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: Apakah seseorang (suami, istri, anak, mertua) memiliki uang, tanah, atau perhiasan dalam satu tahun terakhir tanpa izin? Dilarang punya anak. Atau tidak bekerja di luar rumah.
- f. Kesadaran hukum dan politik: Pengetahuan tentang nama-nama perangkat desa atau pemerintah daerah. Seorang anggota DPRD setempat. Nama Presiden; tahu pentingnya akta nikah dan hukum waris.
- g. Partisipasi dalam Kampanye dan Protes: Jika Anda berpartisipasi dalam kampanye atau protes dengan orang lain, misalnya jika suami Anda memukuli

istri Anda, orang itu dianggap diberdayakan. Seorang istri yang mengabaikan suami dan keluarganya. Gaji yang tidak adil; penyalahgunaan kesejahteraan.

- h. Ketahanan Ekonomi dan Sumbangan Keluarga: Kepemilikan Rumah, Properti, Aset Usaha, Tabungan. Orang-orang memiliki poin tinggi ketika mereka memiliki aspek-aspek ini sendiri atau terpisah dari pasangan mereka.

D. Pendekatan Pemberdayaan

Pelaksanaan proses pemberdayaan dan pencapaian tujuan di atas dicapai dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5 P, artinya, pemungkinan, peenguatan, perlindungan, penyokong, dan pemeliharaan (Suharto, 2017), berikut uraiannya:

- a) Pemungkinan, yaitu menciptakan potensi, suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari hambatan kultural dan struktural yang menghambatnya.

- b) Penguatan berarti memperkuat pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala keterampilan dan rasa percaya diri untuk mendukung kemandirian masyarakat.
- c) Perlindungan melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari penindasan oleh kelompok kuat, menghindari persaingan tidak sehat atau tidak sehat antara kelompok kuat dan lemah, dan penyalahgunaan kelompok kuat oleh kelompok lemah. Pemberdayaan harus fokus pada penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kontrol yang tidak menguntungkan masyarakat miskin.
- d) Penyokong, yaitu nasihat dan dukungan untuk membantu orang memenuhi peran dan tantangan hidup mereka. Pemberdayaan harus dapat membantu masyarakat dalam menghindari situasi dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- e) Pemeliharaan, yaitu memelihara kondisi yang membantu keseimbangan distribusi kekuasaan

antara kelompok masyarakat yang berbeda. Pemberdayaan harus memastikan keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang untuk melakukan bisnis.

E. Prinsip Pemberdayaan

Pelaksanaan pendekatan di atas didasarkan pada pedoman dan prinsip pekerjaan sosial. Menurut Eddie Suharto, ada beberapa prinsip pemberdayaan dari perspektif pekerjaan sosial.

- 1) Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Oleh karena itu, pekerjaan sosial dan masyarakat perlu bekerja sama.
- 2) Proses pemberdayaan menggambarkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang.
- 3) Komunitas harus melihat dirinya sebagai aktor penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- 4) Kemampuan diperoleh atau diasah melalui pengalaman hidup, terutama yang memberi orang rasa kemampuan.

- 5) Solusi yang muncul dari situasi tertentu beragam dan keragaman yang muncul dari berbagai faktor situasi yang bersangkutan harus dihormati.
- 6) Jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan kemampuan dan pengendalian diri seseorang.
- 7) Komunitas harus berpartisipasi dalam pemberdayaannya sendiri.
- 8) Tingkat kesadaran adalah kunci pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan untuk perubahan.
- 9) Pemberdayaan mencakup akses terhadap sumber daya dan kemampuan untuk menggunakan sumber daya tersebut secara efektif.
- 10) Proses pemberdayaan itu dinamis, sinergis, terus berubah dan berkembang, tetapi selalu ada solusi yang berbeda untuk masalah tersebut.
- 11) Pemberdayaan dicapai melalui pembangunan ekonomi yang sejajar dengan struktur individu.

F. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan

Pemberdayaan harus berkesinambungan, inklusif dan inspiratif, sampai pada titik keseimbangan dinamis antara pemerintah dan semua segmen yang diperintah.

Ndraha, (2003) menyatakan bahwa pemberdayaan memiliki berbagai bentuk program pemberdayaan, antara lain:

- a) Pemberdayaan politik bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar korban dengan pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar rakyat yang diperintah memperoleh hak berupa barang, jasa, jasa, dan kesejahteraan tanpa merugikan pihak lain.
- b) Pemberdayaan sosial budaya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui investasi manusia dalam rangka meningkatkan nilai kemanusiaan, pemanfaatan dan perlakuan yang adil terhadap masyarakat.
- c) Pemberdayaan lingkungan dimaksudkan sebagai program kepedulian dan pelestarian lingkungan untuk memungkinkan berdaulat dan lingkungan untuk berkoordinasi secara fasilitatif dan saling menguntungkan.

d) Pemberdayaan ekonomi. Ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang diatur sebagai konsumen untuk bertindak sebagai penjamin diri terhadap dampak negatif pertumbuhan dan untuk membayar risiko salah urus, beban pembangunan, kegagalan program dan kerusakan lingkungan meningkat.

Keberhasilan pemberdayaan tidak hanya menekankan pada hasil, tetapi juga proses partisipasi yang tinggi terhadap kebutuhan dan kemungkinan masyarakat. Keterlibatan yang terarah pada tahap perencanaan merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan. Melalui upaya ini, mereka memiliki ikatan emosional dengan keberhasilan program pemberdayaan (Oos M. Anwas, 2013).

Selain keberhasilan, ada juga kendala pemberdayaan yang dialami kelompok. Kegagalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegagalan atau suatu keadaan atau sebab lain yang dapat menyebabkan suatu kegagalan. Keterbatasan Beberapa hal dapat memperlambat kinerja sistem.

BAB VI PEMBERDAYAAN NELAYAN



A. Teori Nelayan

Nelayan pada umumnya adalah kelompok masyarakat yang pada umumnya bertempat tinggal di pesisir pantai dan mata pencahariannya bergantung langsung pada hasil laut, baik dengan menangkap ikan maupun bertani. (Mulyadi, 2005). Hidup di pesisir pantai, hampir semua penduduknya adalah nelayan. Mata pencaharian nelayan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan industri perikanan, termasuk proses penyediaan daerah penangkapan, alat tangkap, penangkapan dan penjualan (Muhammad Saidi, 2014). Sesuai dengan ketentuan UU RI No. Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur tentang pengertian nelayan dan membedakan antara nelayan dengan nelayan kecil. Pasal 1 (1) menyatakan bahwa “nelayan” adalah orang yang mata pencahariannya di bidang perikanan. Sebaliknya, Pasal 1 (11) menyatakan bahwa “nelayan kecil” adalah orang yang mandiri yang terdiri dari menangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari di atas kapal penangkap ikan sampai dengan 5 gros ton (GT).

Nelayan memainkan peran yang sangat strategis di sektor kelautan dan perikanan dalam hal ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, keberlanjutan sumber daya, peran geopolitik, dan peran dalam meningkatkan perdagangan devisa (Satria, 2015). Di sisi lain, para nelayan khususnya ABK dan pekerja mengalami berbagai permasalahan seperti: B. Ketidakadilan dalam pembagian upah. Nelayan di bawah tidak bisa banyak bicara dan hanya mengikuti keputusan nahkoda (Baskoro, 2014).

Kusnadi (2002) menyatakan bahwa nelayan memiliki tingkat kesejahteraan yang paling rendah dibandingkan dengan masyarakat mandiri lainnya, atau merupakan bagian dari masyarakat termiskin. Bakat yang buruk dalam industri perikanan mengurangi produktivitas, yang mengakibatkan pendapatan nelayan berkurang dan kemiskinan. Nugraha (2014). Menurut Kusnadi (2003), kemiskinan nelayan memiliki dua penyebab: internal dan eksternal. Kedua penyebab tersebut saling berinteraksi dan saling melengkapi. Hal ini karena kemiskinan internal erat kaitannya dengan kondisi internal dan aktivitas tenaga kerja sumber daya manusia nelayan. Penyebab internal tersebut antara lain: (a) terbatasnya kualitas sumber daya manusia nelayan, (b)

terbatasnya modal usaha dan kemampuan teknis penangkapan. (c) hubungan kerja (pemilik kapal - nelayan yang bekerja) dalam organisasi perikanan dianggap kurang menguntungkan bagi nelayan yang bekerja, (d) diversifikasi perikanan sulit, Gaya hidup yang dianggap sangat tergantung dan (f) boros. Tidak berorientasi masa depan. Penyebab eksternal kemiskinan, di sisi lain, berhubungan dengan kondisi eksternal mereka sendiri dan aktivitas kerja nelayan. Ada sembilan penyebab eksternal yang terlibat: (a) kebijakan pembangunan perikanan yang lebih produktif untuk mendukung pertumbuhan nasional dan sub-ekonomi, dan (b) sistem pemasaran hasil laut yang lebih menguntungkan bagi perantara (c) kerusakan ekosistem pesisir dan laut dari pencemaran tanah, penangkapan ikan secara kimiawi, perusakan terumbu karang dan konservasi hutan mangrove pesisir; (d) penggunaan alat tangkap yang tidak ramah; dan (e) perusak lingkungan (f) teknik pengolahan pasca panen yang terbatas; (g) non- kesempatan kerja sektor perikanan di desa-desa nelayan (h) kondisi alam dan variasi musim; (i) isolasi geografi desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

Mulyadi (2007) menyatakan bahwa kemiskinan terdiri dari dua komponen utama yaitu kerentanan dan ketidakberdayaan. Mengingat kerentanan yang mereka alami, orang miskin akan kesulitan menghadapi keadaan darurat. Hal ini tercermin, misalnya, sulitnya bagi nelayan perorangan untuk membeli bahan bakar untuk keperluan penangkapan ikan. Karena dulu tidak ada hasil tangkapan untuk dijual dan tidak ada dana cadangan yang digunakan untuk kebutuhan mendesak. Begitu pula dengan nelayan pekerja yang merasa tidak berdaya terhadap nahkoda yang mempekerjakannya, padahal bagi hasil yang diterimanya dianggap tidak adil.

Ciri umum masyarakat nelayan yang miskin adalah keterbatasan kepemilikan aset, hal ini tergambar dari kondisi rumah. Rumah nelayan terletak di pantai, di pinggir jalan kampung umumnya merupakan bangunan non permanen atau semi permanen, berdinding bambu, berlantai tanah, ventilasi rumah kurang baik sehingga sehari-hari bau anyir ikan menyengat dan meskipun siang hari, di dalam rumah cukup gelap, sementara juru mudi atau juragan jauh lebih baik berbentuk permanen (Siswanto 2008).

Seperti masyarakat yang lain, masyarakat nelayan menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks. Masalah-masalah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: (1) kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat, (2) keterbatasan akses modal, teknologi dan pasar, sehingga mempengaruhi dinamika usaha, (3) kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada, (4) kualitas SDM yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, (5) degradasi sumberdaya lingkungan, baik di kawasan pesisir, laut maupun pulau-pulau kecil, dan (6) belum kuatnya kebijakan yang berorientasi pada kemaritiman sebagai pilar utama pembangunan nasional (Kusnadi, 2009 dalam Fanesa Fargomeli, 2014).

Kalau dilihat kembali, masalah-masalah di atas tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lainnya. Misalnya, masalah kemiskinan yang disebabkan oleh hubungan antara keterbatasan akses, disfungsi kelembagaan ekonomi, kualitas sumber daya manusia yang buruk, dan kerusakan sumber daya lingkungan. Oleh karena itu, masalah penanggulangan kemiskinan pesisir harus menjadi esensial. Sekalipun harus memilih salah satu

faktor sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, pilihan itu sangat mempengaruhi faktor-faktor lain dan menjadi pendorong untuk mengatasi masalah-masalah lain. Pilihan seperti itu tentu saja sulit, tetapi harus dibuat untuk merancang dan mengoptimalkan secara efisien sumber daya yang terbatas yang sebenarnya tersedia.

B. Alasan Pemberdayaan Nelayan

Nelayan secara struktural berada dalam kemiskinan. Nelayan tidak berdaya dan tidak memiliki kekuatan untuk keluar dari kemiskinan. Kemiskinan yang selalu menjadi “ciri” nelayan dalam banyak hal, dapat dijelaskan dengan berbagai fakta seperti kondisi permukiman kumuh, tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, serta kerentanan terhadap perubahan sosial, politik dan ekonomi. Ketidakberdayaan mereka terhadap intervensi investor dan penguasa yang akan datang sedang terjadi.

Masyarakat nelayan sering disebut termiskin karena sangat miskin. Ada orang-orang yang membantu

mereka dari luar dalam bentuk kekuasaan dan kekuatan agar mereka bisa keluar dari kemiskinan jika tidak diberdayakan. Jika tidak, kemiskinan tetap ada di sekitar mereka. Kemiskinan menjadi semakin serius dan meluas sehingga menciptakan kemiskinan yang masif dalam berbagai aspek dan dalam perjalanan hidup. Ini dimulai dengan kemiskinan dan kemiskinan ekonomi dan berkembang menjadi kemiskinan dan kemiskinan dalam sosial, budaya, hukum dan akhirnya kemiskinan politik. Suara Anda sangat berharga karena Anda dapat membeli dan menjual dengan murah. Jika suara mereka dibeli, mereka tidak punya apa-apa. Anda tidak memiliki apa-apa selain kehidupan itu sendiri. Kehidupan yang berarti bagi Anda (Dault 2008).

Hikmat (2006) mengemukakan bahwa pemberdayaan dapat menjadi upaya untuk memenuhi potensi yang sudah dimiliki oleh suatu komunitas. Dengan kata lain, keberhasilan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan antara lain berarti bahwa masyarakat merupakan bagian dari pelaku pembangunan itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat mencakup bagaimana inovasi yang lebih tinggi dapat bermanfaat bagi masyarakat, seperti apa budaya lokal (termasuk

kearifan lokal), mekanisme pelaksanaan dan pendanaan untuk pembangunan, dll., berbagai aspek perlu dipertimbangkan.

Dari hal tersebut di atas sangat diperlukan penguatan komunitas nelayan. Pemberdayaan masyarakat nelayan secara sadar dan sistematis untuk membangun kemandirian sosial, ekonomi, dan politik masyarakat nelayan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Kemandirian masyarakat diperlukan untuk meningkatkan daya tawar dalam pembangunan daerah dan pemanfaatan sumber daya lingkungan. Oleh karena itu, ke depan masyarakat nelayan diharapkan menjadi sasaran pembangunan daerah dan kawasan pesisir akan mengalami perkembangan ekonomi yang dinamis. Program pemberdayaan harus mampu memfasilitasi terciptanya gerakan vertikal dalam masyarakat nelayan (Satria, 2001). Kemandirian masyarakat nelayan merupakan langkah dalam menentukan keberhasilan pemberdayaan yang berkelanjutan. Akan sulit untuk mencapai kesejahteraan sosial tanpa kemandirian. Unsur kemandirian masyarakat ditentukan oleh kemampuan ekonomi, kelayakan politik, dan ketaatan pada prinsip-

prinsip sosial yang diyakini dapat menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih baik (Kusnadi 2009).

C. Pemberdayaan Nelayan

Pada dasarnya pemberdayaan nelayan sama dengan , dengan pemberdayaan umum. Ini termasuk fase pemberdayaan , yaitu pemberdayaan individu dan pemberdayaan ikatan individu/kelompok (Sahri, (2012)).

1. Persetujuan individu

Pemberdayaan individu pada dasarnya dapat memberikan kepercayaan, kesempatan dan motivasi kepada setiap individu untuk mencapai atau mencapai kemampuannya sehingga dapat memajukan kehidupan dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya sosial dan ekonomi dalam pembangunan.

2. Penguatan ikatan individu/kelompok

Penguatan ikatan individu atau kelompok dapat meningkatkan sumber daya waktu, keterampilan dan modal nelayan.

D. Strategi Pemberdayaan Nelayan

Makalah Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa pemberdayaan nelayan harus bersifat komprehensif, berdasarkan karakteristik dan jangkauan pemberdayaan masyarakat pesisir (nelayan). Pembangunan komprehensif, yaitu pembangunan dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) Tetap lokal (termasuk sumber daya lokal sehingga masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat dari pengembalian sumber daya lokal). Sumber daya lokal yang digunakan adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam, (2) peningkatan kesejahteraan (berfokus pada kepentingan umum daripada peningkatan produksi), (3) kemitraan (lebih banyak dengan penduduk setempat atau masyarakat miskin). Dapat membuka akses teknologi, pasar, pengetahuan, permodalan, manajemen yang lebih baik atau profesional, dan hubungan bisnis yang lebih luas, (4) Keseluruhan atau beberapa aspek (pembangunan mencakup semua aspek), (Perlu mengetahui dan menggunakan semua sumber daya lokal) dan (5) Sustainability (keberlanjutan pembangunan itu sendiri, termasuk aspek ekonomi dan sosial) (DKP2002).

Ditegaskan bahwa masalah kualitas sumber daya manusia dan lingkungan harus ditangani secara khusus dalam pembangunan pesisir, dan umumnya dalam pembangunan perikanan dan kelautan, karena masyarakat pesisir umumnya memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang rendah. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan ketika berinvestasi dalam talenta pesisir. Tujuan penguatan wilayah pesisir khususnya nelayan dirumuskan sebagai berikut.

- 1) Terwujudnya kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
- 2) Ketersediaan infrastruktur dan fasilitas manufaktur lokal untuk menyediakan akses yang hemat biaya dan berkualitas kepada masyarakat.
- 3) Memperkuat peran lembaga masyarakat sebagai wadah aksi kolektif untuk mencapai tujuan individu.
- 4) Menciptakan kegiatan ekonomi produktif di suatu wilayah yang bercirikan sumber daya lokal, memiliki pasar yang jelas dan berkelanjutan berdasarkan kapasitas sumber daya, dilaksanakan

dan berdampak pada masyarakat. Teknologi canggih berasal dari proses evaluasi dan kegiatan.

- 5) Penciptaan jaringan transportasi dan komunikasi yang tepat sebagai dasar jaringan ekonomi pesisir dan pesisir dan pedalaman.
- 6) Terwujudnya struktur perekonomian Indonesia yang berbasis kegiatan ekonomi pesisir dan laut sebagai bentuk pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam laut.

Menurut Nikijuluw (2002), ada lima pendekatan untuk memperkuat komunitas nelayan. Artinya, (1) menciptakan peluang kerja alternatif sebagai sumber pendapatan tambahan bagi keluarga. (2) Mendekatkan masyarakat dengan pembiayaan dengan penekanan pada membangun mekanisme pembiayaan sendiri. (3) Membawa orang lebih dekat dengan sumber teknologi baru yang lebih sukses dan efisien. (4) Membawa orang lebih dekat ke pasar. (5) Membangun solidaritas dan aksi kolektif dalam komunitas Kelima pendekatan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan secara serius aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan dan potensi sumber daya masyarakat nelayan.

E. Penyelenggaraan Strategi Pemberdayaan Nelayan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Republik Indonesia Tahun 2016, Pasal 12 (3) menyatakan bahwa strategi pemberdayaan nelayan dilaksanakan sebagai berikut. a) Pendidikan dan pelatihan; b). Saran dan dukungan; c). Kemitraan profesional; d) akses mudah ke ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, dan e). Memperkuat sistem. Kejelasan implementasi strategi pemberdayaan nelayan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelatihan menurut paragraf 1 dari harus mengambil setidaknya bentuk berikut:
 - a) Pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan atau pergarman.
 - b) Memberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan untuk pendidikan di bidang perikanan atau pergarman. Atau
 - c) Pengembangan kursus pelatihan kewirausahaan di bidang perikanan atau pergarman.
2. Saran dan dukungan Sejauh kewenangannya, pemerintah pusat memberikan saran dan dukungan kepada tambak garam, termasuk nelayan, budidaya dan keluarganya.

3. Kemitraan bisnis

Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk meningkatkan kemitraan dengan perusahaan perikanan atau garam sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

4. Akses mudah ke ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi

- a) Diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) Kerjasama dalam alih teknologi. Dan
- c) Memberikan kemudahan bagi nelayan, budidaya, dan produsen garam untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

5. Penguatan Kelembagaan Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dapat berupa:

- a) Fasilitas sosial berbasis budaya lokal.
- b) kelompok nelayan;
- c) Kelompok Perusahaan Bersama;
- d) Kelompok Akuakultur;
- e) Kelompok pengolahan dan pemasaran hasil laut.

- f) Kelompok pengolahan dan pemasaran bahan baku garam. atau
- g) Kelompok Usaha Garam Rakyat

BAB V **KOLABORASI STAKEHOLDER**



A. Konsep Kolaborasi

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah kolaborasi, baik dalam dunia pemerintahan, bisnis, maupun politik. Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu pola hubungan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Ada sekian banyak pengertian tentang kolaborasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang beragam. Beragamnya pengertian tersebut didasari oleh prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, tanggung jawab dan tanggung gugat.

Secara etimologis, *collaborative* berasal dari kata *co* dan *labor*, yang mengandung: berarti mengumpulkan energi atau meningkatkan kapasitas penggunaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati. Kolaborasi secara singkat dapat didefinisikan sebagai Kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama yang dilakukan pemerintah saat ini sering kali menggunakan istilah kolaborasi.

Berkaitan dengan definisi, akan dijelaskan mengenai beberapa definisi kolaborasi dan *collaborative*

governance. Dyer and Singh (1998, dalam Celik et al, 2019) mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah “ value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by developing shared routines”. Sedangkan Gray (1989) mengungkapkan bahwa : *Collaboration is a process through which parties with different expertise, who see different aspects of a problem, can constructively explore differences and find novel solutions to problems that would have been more difficult to solve without the other’s perspective* (Gray,1989). Lindeke and Sieckert (2005) mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah: *Collaboration is a complex process, which demands planned, intentional knowledge sharing that becomes the responsibility of all parties* (Lindeke and Sieckert, 2005).

Kolaborasi merupakan kata serapan yang berasal dari Bahasa latin yakni *Collaborare* yang artinya “ bekerja Bersama (Merriam-Webster). Dalam kamus Heritage Amerika (2000), kolaborasi diartikan sebagai kegiatan bekerja sama khususnya dalam usaha penyatuan pemikiran. Hal ini senada dengan pendapat Wood & Gray (1991:5) yang mengemukakan bahwa : “*Collaboration as a process through which parties who see different aspects a problem can constructively explore their differences and search for*

solutions that go beyond their own limited vision of what is possible”.

Selain itu, kata kolaborasi sering digunakan untuk menggambarkan proses Penyelesaian pekerjaan lintas batas, interdisipliner, lintas batas (O'Leary, 2010) atau antar organisasi bahkan negara. Berikut ini Kerjasama memiliki arti yang sangat umum dan luas dalam terminology menggambarkan situasi munculnya kerjasama antara dua orang atau Lembaga atau kelompok yang saling memahami masalah bersama-sama dan mencoba untuk membantu satu sama lain untuk memecahkan masalah bersama lebih tepatnya.

Ada kerja sama yang intensif untuk menyelesaikan masalah kedua belah pihak pada saat yang sama. Namun, persepsi ini tidak demikian Konsep - konsep kerjasama. Identik dengan ilmu-ilmu sosial Secara umum kerjasama dipahami sebagai salah satu konsep jurusan ilmu sosial yang kompleks, tergantung dari sudut pandang para ahli untuk memahaminya. Selain itu juga Dyer and Singh (1998, dalam Celik et al, 2019) mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah “ value generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by

developing shared routines". Menjelaskan bahwa Kolaborasi adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih perusahaan yang bertujuan untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama.

Teori kolaborasi (*Collaborative Theory*) menurut Chris Ansell Alison Gash (JPART 18, 2007) adalah "A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets". Menjelaskan bahwa Kolaborasi adalah Pengaturan pemerintahan di mana satu atau lebih badan publik langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, dan deliberatif dan yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik" menjelaskan bahwa tata kelola kolaboratif

B. Pentingnya Kolaborasi

Kolaborasi muncul dan dikembangkan secara adaptif untuk merespon adanya kompleksitas masalah publik dan konflik-konflik yang bernuansa politik atau dengan kata lain dilakukannya.

Sudarmo (2010) menjelaskan kolaborasi di dorong oleh adanya Upaya pragmatisme dalam menyelesaikan masalah yang selama ini tidak kunjung teratasi melalui penerapan teori-teori konvensional yang selama dipercaya mampu mengatasi masalah.

Kolaborasi juga dipandang sebagai respon organisasi terhadap perubahan-perubahan atau pergeseran-pergeseran lingkungan kebijakan. Pergeseran-pergeseran bisa dalam bentuk jumlah aktor kebijakan yang meningkat, isu-isu semakin meluas keluar batas-batas normal yang bisa dirasakan atau sulit dideteksi karena ketertutupannya, kapasitas pemerintah daerah, kota dan atau pemerintah pusat terbatas sedangkan institusi-institusi di luar pemerintah meningkat dan inisiatif spontan masyarakat semakin meluas dan kritis.

Sadarkah kita bahwa salah satu faktor yang memiliki kontribusi terbesar dalam menyukseskan berbagai kegiatan 'bisnis' ataupun kegiatan di bidang 'pemerintahan' itu terletak pada kerelaan para pegawai dalam mengerjakan tugas pekerjaan mereka secara teamwork atau adanya aktivitas kerja yang dilakukan secara kolaboratif. Betapa penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara berkolaboratif akan dapat menciptakan penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat, lebih efektif, serta lebih efisien dibandingkan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara sendirian. Bahkan kolaborasi dapat menciptakan para pegawai menjadi lebih bertanggung jawab, sehingga lambat laun akan dapat meningkatkan derajat motivasi mereka, terutama ketika mereka bekerja secara teamwork. Terlebih lagi apabila mereka dihadapkan pada sebuah tantangan yang datang dari luar organisasi. Situasi yang demikian ini akan dapat meningkatkan kreativitas kerja mereka secara tajam yang bertujuan untuk meningkatkan semangat berkolaborasi yang semakin kuat dan sehat. Lebih dari itu, pembentukan kolaborasi dapat digunakan untuk melakukan percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama. Bahkan, dalam proses pencapaian tujuan tersebut, tidak dianjurkan

melakukan pengotakngotakan atas tugas-tugas yang diemban oleh masing-masing pihak.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nawawi (1984) bahwa kolaborasi merupakan upaya sadar dalam mencapai tujuan bersama yang telah mereka tetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan. Pembagian kerja tersebut bukanlah sebagai bentuk pengotak-ngotakan kerja, tetapi masih harus dinilai sebagai satu kesatuan kerja yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan bersama. Sementara itu pada sisi yang lain, pembentukan kolaborasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan atas pelaksanaan suatu pekerjaan yang besar, beban pendanaan yang besar, penyediaan aset kerja, ataupun untuk penanggulangan berbagai permasalahan yang berat dan rumit yang tidak mungkin dapat dikerjakan secara individual tanpa ada partisipasi dan campur tangan dari pihak lain.

Adapun Ansel dan Gash, 2009 (Sudarmo, 2010), menjelaskan mengenai alasan-alasan dilakukannya kolaborasi, yakni : “1) kegagalan implementasi kebijakan di tataran lapangan, 2) ketidakmampuan kelompok-kelompok, terutama karena pemisahan rezim-rezim

kekuasaan untuk menggunakan arena-arena institusi lainnya untuk menghambat keputusan, 3) mobilisasi kelompok kepentingan dan 4) tingginya biaya dan politisasi regulasi. Demikian pula kecenderungan diadakannya Collaborative adalah dilatarbelakangi oleh perkembangan organisasi”.

Secara lebih terperinci, Valdellon (2017) mengatakan bahwa pembentukan kolaborasi itu, baik yang dilakukan antar individu maupun antar lembaga/organisasi sangat penting karena kolaborasi memiliki sebelas (11) manfaat yang meliputi hal berikut :

1. Kolaborasi dapat meningkatkan fleksibilitas organisasi (improved flexibility of the organization). Secara faktual, telah diakui bahwa pola kerja tim atau kolaborasi itu merupakan fondasi dasar dari metode pelaksanaan kerja. Apabila kolaborasi dapat dilaksanakan dengan baik, kemampuan seseorang atau organisasi itu akan menjadi semakin kuat dalam menangani perubahan yang terjadi secara tiba-tiba. Betapa pola kerja tim itu mampu membuat penyelesaian pekerjaan itu menjadi lebih ringan dan lebih mudah. Di samping itu,

penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara kolaboratif dianggap merupakan tindakan cerdas dan lebih fleksibel.

2. Kolaborasi dapat digunakan untuk saling mempertautkan para pekerja (*engaged employees*). Berdasarkan kegiatan yang pernah dilakukan oleh Valdellon bahwa pekerja di Amerika Serikat itu hanya 33% yang saling bertautan (bekerja sama satu sama lain). Hal ini sangat tidak menguntungkan bagi organisasi. Apabila seorang pimpinan atau manajer itu tidak mampu menjalin hubungan yang baik bagi para pekerjanya untuk bekerja secara teamwork atau kolaboratif, ia bukanlah seorang pimpinan yang efektif. Cara yang terbaik dalam melaksanakan pekerjaan di dalam sebuah organisasi itu harus ditempuh melalui pelibatan mereka di dalam sebuah tim kerja.
3. Kolaborasi dapat dimanfaatkan untuk memperlakukan karyawan atau pegawai secara yang sehat (*healthier employees*). Kolaborasi merupakan strategi pembentukan tim kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi 'kesehatan kerja' pegawai atau karyawan. Bagaimana mungkin

tim kerja yang itu dapat meningkatkan kesehatan kerja bagi pegawai apabila mereka tidak diperlakukan secara baik oleh sebuah organisasi? Menurut pandangan dari Harvard Business Review, apabila Anda benar-benar menginginkan terjadinya pola kerja pegawai yang berkualitas dan penuh tanggung jawab, ciptakanlah 'nilai-nilai budaya kerja' ideal yang dapat mereka jadikan sebagai way of life dalam melakukan pola kerja yang kolaboratif.

4. Kolaborasi dapat digunakan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi yang produktif (*more productive meeting*). Kolaborasi yang efektif merupakan hasil dari adanya rapat koordinasi yang efisien. Itu artinya selenggarakanlah rapat kerja sejarang mungkin, tetapi membahas dan membuat keputusan tentang banyak hal selengkap dan sejelas mungkin. Budaya kerja yang proaktif dapat memperkaya budaya korporasi. Para pegawai atau karyawan hanya membutuhkan rapat kerja, ketika diperlukan untuk dimanfaatkan sebagai tool of coordination dan digunakan sebagai tools to documentation atas kemajuan kerja yang telah

dilaksanakan atau digunakan untuk pendelegasian sebuah tugas pekerjaan. Lebih dari itu, apabila rapat kerja itu memang harus dilakukan, rapat tersebut harus mendapatkan sharing informasi yang proaktif agar dapat digunakan untuk melakukan kesepakatan kerja dan digunakan sebagai sarana untuk saling memberikan dukungan atas berbagai upaya yang dilakukan oleh masing-masing anggota.

5. Kolaborasi semakin memperkuat terciptanya talenta yang tinggi (*more attractive to top talent*). Melalui kolaborasi, dapat diciptakan seseorang atau sebuah organisasi yang memiliki daya saing tinggi ketika di dalam organisasi itu terdapat orang-orang yang bertalenta tinggi. Berikanlah motivasi yang dapat menciptakan terwujudnya *job prospect* yang mereka inginkan dan yang dapat mereka gunakan untuk meningkatkan kemampuan bagi semua orang sehingga mereka dapat saling menghormati siapa saja yang berkolaborasi serta respek terhadap setiap orang yang mereka anggap berjasa dalam meningkatkan pemahaman mereka tentang penyelesaian atas sebuah pekerjaan.

6. Kolaborasi dapat digunakan untuk memacu terhadap kemajuan bisnis yang lebih cepat (*accelerated business velocity*). Dalam kehidupan bisnis, budaya kolaboratif sangat bermanfaat bagi mereka dalam peningkatan kemampuan organisasi dalam memproduksi dan mempercepat pemasaran. Betapa kecepatan atas communication sharing dalam sebuah tim kerja yang kolaboratif sepenuhnya dapat menciptakan proses kerja yang cepat serta dapat mempermudah untuk memproduksi sesuatu. Bahkan, dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan produk-produk baru.
7. Kolaborasi dapat meningkatkan daya simpan atau daya ingat yang lebih tinggi (*higher retention rates*). Manfaat apakah yang lebih berguna daripada pelibatan pegawai atau karyawan secara lebih baik dalam proses pelaksanaan pekerjaan? Tiada lain dan tiada bukan adalah menciptakan perasaan bahagia, bangga, dan terhormat atas pelibatan mereka. Kondisi atau perlakuan yang semacam itulah yang selalu mereka ingat, sehingga mereka memiliki alasan yang kuat untuk selalu

mendukung, loyal, dan setia terhadap organisasi yang berakibat seriusnya mereka dalam mengemban tugas-tugas pekerjaannya. Artinya, jika orang-orang yang bekerja sama dengan mereka, mereka diperlakukan secara baik, bersikap sangat familier, bermurah hati, dan penuh hormat serta saling menghargai atas jerih payah masing-masing orang. Mereka akan membangun kekompakan kerja yang berdampak positif bagi semua pihak. Walaupun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa kolaborasi selalu menghasilkan situasi tersebut. Kolaborasi yang sehat dan memiliki fondasi kolaborasi yang kuat sajalah yang dapat menghasilkan kondisi tersebut.

8. Kolaborasi dapat menciptakan ide-ide kreatif yang inovatif (*innovative ideas*). Sungguh bahwa hidup berkolaborasi itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Dalam hal tertentu, bisa saja kolaborasi itu membangkitkan friksi-friksi negatif apabila tidak dikelola dengan baik dan benar sehingga kolaborasi yang ada justru tidak menghasilkan apa pun yang berguna, tetapi menciptakan situasi yang sebaliknya. Namun,

apabila berbagai friksi yang muncul dalam kehidupan kolaboratif itu bisa dikelola secara benar, berbagai friksi ataupun konflik yang terjadi antarpersonal dalam berkolaborasi itu bisa digunakan untuk membangkitkan dinamika yang positif dan dapat memunculkan ide-ide yang inovatif. Oleh sebab itulah, apabila terjadi konflik dan friksi dalam kehidupan kolaboratif, hal itu bisa dikelola dengan menggunakan metode manajemen konflik yang tepat yang akan dapat melahirkan ide-ide inovatif yang bermanfaat bagi organisasi ataupun bagi orang-orang yang berada dalam organisasi.

9. Kolaborasi dapat digunakan untuk menempatkan posisi stakeholder secara lebih tepat (*better alignment with stakeholders*). Apabila kita membahas kolaborasi, hal itu akan lebih bagus lagi jika ide tersebut digunakan secara lebih spesifik, yakni membangun kolaborasi dengan pihak eksternal, baik itu dengan pihak customers, partners (mitra kerja), vendors, suppliers, stakeholders, ataupun pihak-pihak lain yang terkait dengan proyek yang

sedang Anda kerjakan ataupun yang berkaitan dengan produk yang dihasilkan.

10. Kolaborasi dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja bagi segenap individu yang terlibat (*enhanced individual productivity*). Berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan oleh McKinsy & Company, pelaksanaan proses kolaborasi yang digunakan sebagai sarana untuk membentuk jaringan kerja ternyata dapat meningkatkan produktivitas kerja para personel antara 20% sampai dengan 30%. Lebih dari itu, ketika beberapa teamwork menggunakan alat komunikasi secara efisien dalam proses kerjanya, hal tersebut dapat meningkatkan kinerja para anggota tim untuk mencapai hasil yang lebih cepat dan lebih berkualitas.
11. Kolaborasi dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan (*increased profitability*). Pada akhirnya, tentu saja kolaborasi dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan bagi semua pihak yang berkolaborasi. Mengapa demikian? Pada umumnya, kolaborasi itu dibangun berdasarkan hasil rekrutmen atas orang-orang yang kredibel atau atas

pihak-pihak yang memiliki keunggulan spesifik di bidangnya masing-masing. Dengan demikian, berbagai keunggulan tersebut sangat berguna bagi kehidupan berkolaborasi. Mereka pada umumnya memiliki ide-ide yang bagus serta inovatif yang dapat mendorong terciptanya keahlian baru, kemampuan baru, dan metode-metode kerja baru dan produk baru yang sangat bermanfaat bagi kemajuan organisasi.

Memperhatikan ke-11 aspek tersebut menunjukkan bahwasanya kolaborasi yang dilakukan antarindividu ataupun antarlembaga merupakan hal yang penting dalam rangka mempermudah dan memperingan kerja, sehingga kolaborasi itu sangat penting untuk dilakukan.

Intinya bahwa kolaborasi ini dianggap sebagai salah solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan publik yang semakin kompleks sehingga memerlukan beberapa pihak yang terlibat dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kompleks tersebut.

C. Karakteristik dan Prinsip Dalam Kolaborasi

Karakteristik dan Prinsip Dalam Collaborative, menurut (Lestari & Maliki, 2001) bahwa ada lima (5) komponen utama dalam kolaborasi:

1. Collaborative Culture

Seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap bisnis. Di sini yang dimaksudkan adalah budaya dari orang-orang yang akan berkolaborasi.

2. Collaborative Leadership

Suatu kebersamaan yang merupakan fungsi situasional dan bukan sekedar hirarki dari setiap posisi yang melibatkan setiap orang dalam organisasi.

3. Strategic Vision

Prinsip-prinsip pemandu dan tujuan keseluruhan dari organisasi yang bertumpu pada pelajaran yang berdasarkan kerjasama intern dan terfokus secara strategis pada kekhasan dan peran nilai tambah di pasar.

4. Collaborative Team Process

Sekumpulan proses kerja non birokrasi yang dikelola oleh tim-tim kolaborasi dari kerjasama profesional yang bertanggung jawab penuh bagi keberhasilannya dan mempelajari keterampilan-keterampilan yang memungkinkan mereka menjadi mandiri.

5. Collaborative Structure

Pembenahan diri dari sistem-sistem pendukung bisnis (terutama sistem informasi dan sumberdaya manusia) guna memastikan keberhasilan tempat kerja yang kolaboratif. Para anggotanya merupakan kelompok intern yang melihat organisasi sebagai pelanggan dan terfokus pada kualitas di segala aspek kerjanya.

Merujuk pada pendapat Endang dan Maliki diatas, dapat diketahui bahwa kolaborasi merupakan salah satu karakteristik dalam strategi negosiasi yang utama untuk mencapai kesepakatan bersama dari adanya kepentingan yang berbeda-beda dari pihak- pihak yang sesungguhnya mempunyai kepentingan yang sama atas suatu tujuan. Dengan kata lain, kunci dari keberhasilan kolaborasi

adalah adanya pertanyaan "jalan terbaik manakah yang akan kita tempuh untuk mencapai tujuan bersama"

Menurut Carpenter and Sanders (2009), kolaborasi mempunyai 8 (delapan) karakteristik, yaitu: 1). Partisipasi tidak dibatasi dan tidak hirarkis. 2). Partisipan bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan. 3). Adanya tujuan yang masuk akal. 4). Ada pendefinisian masalah. 5). Partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain. 6). Adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pilihan. 7). Implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat, dan 8). Partisipan selalu mengetahui perkembangan situasi.

Guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam kolaborasi, maka kolaborator (pihak yang terlibat dalam kolaborasi) harus memperhatikan beberapa komponen diantaranya budaya, kepemimpinan, strategi yang akan digunakan, tim yang terlibat serta struktur kelembagaan. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Noorsyamsa Djumara bahwa ada lima (5) komponen utama dalam kolaborasi; 1. Collaborative Culture. Seperangkat nilai-nilai dasar yang membentuk tingkah laku dan sikap bisnis.

D. Nilai Dasar *Collaborative*

Nilai dasar *Collaborative*, terdapat sejumlah nilai dalam melakukan kolaborasi. Nilai (*value*) tersebut harus menjadi pegangan bagi kolaborator sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai. Menurut (Djumara, 2008) terdapat tujuh nilai dasar (*The seven core values*) yang digunakan untuk mengembangkan hubungan kerja dengan konsep kolaborasi, yaitu:

1. Menghormati orang lain (*Respect for people*). Landasan utama dari setiap organisasi adalah kepuasan masing-masing individu. Setiap orang yang akan berkolaborasi menginginkan posisi yang kuat dan adanya kesamaan. Mereka menginginkan kepuasan pribadi yang tinggi dan atau lingkungan kerja yang mendukung dan mendorong kepuasan terhadap dirinya.
2. Penghargaan dan integritas memberikan pengakuan, etos kerja (*Honor and integrity*). Dalam banyak budaya, kehormatan dan integritas membentuk perilaku individu.
3. Rasa memiliki dan bersekutu (*Ownership and alignment*). Ketika semua pegawai merasa memiliki

tempat kerjanya, pekerjaan dan perusahaannya maka mereka akan memeliharanya dengan baik.

4. Konsensus (*Consensus*). Ini adalah kesepakatan umum bahwa kegunaan yang amat besar adalah hubungan kerja yang dilandasi oleh keinginan untuk menang-menang (*win-win amounts to*). Dalam tempat kerja yang kolaboratif keputusan 100% harus fully agreed untuk mencapai win-win. Ini artinya mereka harus melewati ketidaksetujuannya sebagai usaha kuat dalam mencapai tujuan.
5. Penuh rasa tanggungjawab dan tanggung-gugat (*Full responsibility and Accountability*). Dalam paradigma hirarki biasanya Orang menjadi tertutup satu dengan yang lainnya, karena uraian pekerjaannya, karena tugas-tugasnya dan karena unit organisasinya. Faktanya Setiap orang hanya akan bertanggung jawab pada daftar tugas pekerjaannya saja.
6. Hubungan saling Mempercayai (*Trust-based Relationship*). Semua orang menginginkan Adanya kepercayaan dan keterbukaan dalam bekerja. Pada prinsipnya mereka juga ingin dipercaya. Akan Tetapi kepercayaan tidak datang Dengan

mudahnya. Pada kenyataannya, banyak di antara mereka antara satu dengan yang lainnya kurang saling mempercayai. Inilah Yang menyulitkan dalam suatu organisasi.

7. Pengakuan dan Pertumbuhan (*Recognition and Growth*). Hal yang tidak kalah penting dalam tempat kerja yang kolaboratif adalah adanya upaya mendorong orang untuk mau bekerja, Dansegeramemberi pengakuan terhadap hasil Kerja seseorang bagi semua anggota tim atau kelompok

E. Bentuk-Bentuk *Collaborative*

Bentuk-bentuk *Collaborative*, berdasarkan beberapa referensi, terdapat tiga jenis kolaborasi yang didasarkan perbedaan antara organisasi grup atau di dalam sikap grup, yaitu:

- a. Kolaborasi primer

Ciri utama dari kolaborasi primer adalah bahwa grup dan individu sungguh-sungguh dilebur menjadi satu. Menurut (Ahmadi, 2004; 101) Grup berisi seluruh kehidupan daripada individu, dan masing-masing saling mengejar untuk masing-masing pekerjaan, demi kepentingan seluruh

anggota dalam grup itu. Contohnya adalah kehidupan rutin sehari-hari dalam bicara, kehidupan keluarga pada masyarakat primitif dan lain- lainnya. Menurut (Narwoko, 2004) ciri utama jenis kolaborasi seperti ini adalah kelompok-kelompok primer yang kecil dan bersifat tatap muka ini, orang perorangan cenderung lebih senang bekerja dalam tim selaku anggota tim dari pada bekerja sebagai perorangan.

b. Kolaborasi sekunder

Apabila kolaborasi primer karakteristik dan masyarakat primitif, maka kolaborasi sekunder berciri sebaliknya. Kolaborasi sekunder adalah khas pada masyarakat modern. Menurut (Ahmadi, 2004), Kolaborasi sekunder ini sangat diformalisir dan spesialisir, dan masing-masing individu hanya membangkitkan sebagian dari pada hidupnya kepada grup yang dipersatukan dengan itu. Sikap orang- orang di sisni lebih individualistis dan mengadakan perhitungan-perhitungan.

c. Kolaborasi tertier

Berbeda halnya dengan tipe kolaborasi Primer dan Sekunder, Kolaborasi Tertier didasari oleh adanya

konflik yang laten. Menurut Ahmadi (2004) Kolaborasi Tertier dilandasi oleh adanya sikap-sikap dari pihak-pihak yang melakukan kolaborasi adalah murni oportunistis. Organisasi mereka sangat longgar dan gampang pecah. Bila alat bersama itu tidak lagi membantu masing-masing pihak dalam mencapai tujuannya. contohnya adalah hubungan buruh dengan pimpinan perusahaan, hubungan dua partai dalam usaha melawan partai ketiga.

F. *Collaborative Governance*

Istilah *Governance* semula digunakan sebagai ukuran oleh Bank Dunia dalam laporan kinerja pembangunan pemerintahan di negara-negara Afrika Selatan, kemudian meluas secara cepat setelah di gunakan oleh berbagai lembaga bantuan Internasional lainnya seperti IMF, UNDP, ORCD, dll karena digunakan sebagai dasar kebijakan dalam menentukan politik bantuan dan pinjaman pada negara dunia III. Penggunaan istilah *governance* sebagai suatu konsep yang berbeda dengan *government*, mulai dipopulerkan secara efektif oleh Bank Dunia sejak tahun 1989. Dalam sebuah laporan yang berjudul "Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable

Growth”, Bank Dunia (1989) mendefinisikan governance sebagai “exercise of political power to manage nation”. Bank Dunia menekankan bahwa legitimasi politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Aktor yang ada dalam sebuah Negara yaitu pemerintah, bisnis dan civil society harus bersinergi dalam membangun sebuah consensus. Dengan demikian maka peran negara tidak lagi bersifat regulatif, tetapi hanya sebatas fasilitatif. Sementara itu, *The Commission on Global Governance* mengartikan *governance* sebagai “the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs”. Dalam bahasa lain Weiss (Pratikno, 2007) mengatakan bahwa governance merupakan proses yang berkelanjutan melalui mana perbedaan kepentingan diakomodasi dan diwujudkan dalam praktek.

Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung stakeholder diluar negara, berorientasi konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik (Ansell & Gash, 2007) Fokus dari pada collaborative

governance ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai drajat konsensus diantara para stakeholder.

Collaborative governance dalam artian sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Ansell C dan Gash A (2007:559), menyatakan Collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya (Davies Althea L Rehema M. White , 2012). Kolaborasi juga sering dikatakan meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi. Berbeda dengan bentuk kolaborasi lainnya atau interaksi stakeholders bahwa organisasi lain dan individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan, *collaborative governance* menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan “berbagi kekuatan”. (Taylo Brent and Rob C. de Loe, 2012).

BAB VI
IMPLEMENTASI
COLLABORATIF GOVERNANCE
DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN



Sebelum melakukan implementasi *Colaboratif Governance* dalam Pemeberdayaan Nelayan maka kita harus memetakan Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan pemberdayaan

A. Analisis Stakeholder dalam Pengelolaan Pemberdayaan

Sebelum menentukan stakeholder yang terlibat dan berkepentingan di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan Bagan di Kabupaten Manokwari yang kami lakukan adalah melakukan klasifikasi stakeholder. Klasifikasi bertujuan untuk menggambarkan pihak sesuai dengan atribut yang mereka miliki dalam pengelolaan pemberdayaan. Atribut yang kami gunakan adalah ukuran pengaruh dan kepentingan. Adapun stakeholder yang terlibat dapat kami klasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat
- 2) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari
- 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Manokwari
- 4) Bappeda Kabupaten Manokwari
- 5) DPRD Kabupaten Manokwari

- 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Papua Barat
- 7) Bappeda Provinsi Papua Barat
- 8) Dinas Sosial Provinsi Papua Barat
- 9) Dinas Koreasi dan UMKM Provinsi Papua Barat
- 10) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat
- 11) Ketua Perhimpunan Nelayan Provinsi Papua Barat
- 12) Pemilik Bagan

Berdasarkan hasil tersebut maka stakeholder yang ada dikelompokkan ke dalam empat bagian yaitu *key player*, *subject*, *context setter*, dan *crowd*. *Key player* merupakan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Manokwari. Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai *key player* yaitu, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari.

Pihak-pihak ini menjadi pihak yang berpengaruh dan berkepentingan karena merupakan pihak-pihak yang paling bersentuhan langsung dengan nelayan. Di mana diantaranya disebabkan kepentingan dari fungsi regulasi

yang memberikan kewenangan terhadap mereka, seperti Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Provinsi Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari yang merupakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang memmanifestasikan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di dalam melakukan pemberdayaan terhadap nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil sesuai dengan perintah Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil.

Mereka juga memiliki pengaruh yang tinggi karena memiliki organisasi yang mampu untuk mempengaruhi pihak-pihak lain di dalam pengelolaan pemberdayaan. Sedangkan para tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang tinggi karena mereka memiliki merupakan pihak yang paling dekat berhubungan dengan nelayan. Selain juga kepentingan yang tinggi dari sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Persepsi kelompok ini merupakan persepsi yang paling berpengaruh di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan bagan di Kabupaten Manokwari.

Kategori yang kedua adalah Subject. Pihak yang berada pada posisi ini mempunyai kepentingan yang

tinggi namun di sisi lain mempunyai pengaruh yang rendah. Pihak-pihak yang dikategorikan sebagai subject di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Manokwari adalah kelompok nelayan (pemilik bagan), koperasi nelayan, nelayan, Perhimpunan Nelayan Indonesia Papua Barat dan tokoh masyarakat. Dari kelima pihak tersebut terlihat bahwa semuanya berasal dari nonpemerintahan. Kelompok nelayan, koperasi nelayan, dan nelayan mempunyai kepentingan yang tinggi di dalam pengelolaan pemberdayaan karena mereka merupakan pihak-pihak yang paling merasakan dampak dari keberhasilan dan kegagalan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Manokwari. Mereka merupakan users dari kegiatan pemberdayaan nelayan. Kepentingan mereka terutama pada fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Pihak-pihak subject ini karena bentuknya adalah nonpemerintah sehingga memiliki kekuatan yang rendah untuk mempengaruhi pihak lain di dalam kegiatan pemberdayaan. Persepsi mereka cenderung menjadi persepsi yang marginal di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Manokwari.

Kategori yang ketiga yaitu context setter. Kategori ini merupakan kelompok yang memiliki pengaruh yang

tinggi namun memiliki kepentingan yang rendah di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Manokwari. Pihak yang berada pada kategori ini yaitu: TPI Sanggeng, DPRD Kabupaten Manokwari, dan Kesekretariatan Daerah Kabupaten Manokwari. Pihak ini mampu untuk mempengaruhi pengelolaan pemberdayaan nelayan karena memiliki kelembagaan yang kuat dengan sumberdaya manusia, regulasi, serta anggaran yang mereka miliki. TPI Sanggeng memiliki kepentingan yang diatur oleh regulasi sebagai tempat kontak nelayan tangkap (buruh) dengan pemilik kapal, sebagai tempat awal untuk mempersiapkan distribusi produksi perikanan melalui penyediaan tempat pelelanaan ikan, sebagai dermga kapal, dan sebagai penanganan mutu ikan. Sedangkan DPRD secara institusi merupakan pihak yang mampu mempengaruhi pengelolaan pemberdayaan yang ada karena fungsi mereka sebagai lembaga perwakilan masyarakat dan kemampuan mereka di dalam mempengaruhi kebijakan yang ada. Kesekretariatan Daerah Kabupaten Manokwari merupakan organisasi daerah yang mengelola pemerintahan daerah secara administratif. Namun, pengaruh yang mereka miliki tidak sejalan dengan kepentingan yang mereka punyai di dalam

pengelolaan pemberdayaan nelayan. Sehingga pihak-pihak tidak terlalu partisipatif di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan. Persepsi mereka hanya sebatas kepentingan yang mereka miliki.

Sedangkan kategori yang terakhir yaitu crowd. Kelompok yang berada pada kategori ini memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Manokwari. Pihak-pihak itu terdiri dari, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Manokwari, Bappeda Kabupaten Manokwari, dan Pengusaha. Pihak-pihak ini merupakan pihak yang memiliki perhatian dengan pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Manokwari tetapi tidak terlibat secara langsung. Sehingga, persepsi dari kelompok ini cenderung tidak terlalu berpengaruh ke dalam persepsi pihak-pihak yang terlibat di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Manokwari. Padahal, mereka merupakan pihak yang memiliki kapasitas untuk itu. Bappeda merupakan organisasi daerah yang memiliki otoritas di dalam mengembangkan wilayah, menyusun rencana pembangunan, dan menyusun rencana anggaran. Pengusaha merupakan pihak-pihak yang harusnya

dilibatkan ke dalam pengelolaan pemberdayaan. Fungsi mereka sebagai pasar yang menampung hasil tangkapan ataupun budidaya nelayan sangat menentukan dari segi ekonomi.

Hasil analisis stakeholder memperlihatkan bahwa hubungan yang ada diantara pihak tidak setara dari kepentingan dan pengaruh. Hal ini memberikan dampak pada aliran informasi yang kemudian membentuk persepsi umum dari semua pihak di dalam pengelolaan pemberdayaan nelayan. Instansi pemerintah menjadi entitas tunggal yang kemudian mempengaruhi persepsi yang ada di dalam pengelolaan (Ilham et al., 2017). sehingga, jika dilihat dari analisis stakeholder maka persepsi dari key player, yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari, dan Tokoh Masyarakat/Adat merupakan pihak-pihak yang persepsi paling mempengaruhi pengelolaan pemberdayaan nelayan yang telah ada maupun yang akan dilakukan di Kabupaten Manokwari.

B. Implementasi *Collaborative Governance*

Collaborative governance merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam mengukur kerjasama antara stakeholder yang terkait dalam memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui satu organisasi sendiri. Adapun langkah yang digunakan dalam mengukur *Collaborative governance* menggunakan beberapa indikator.

Berdasarkan hal tersebut maka kegiatan ini menggunakan teori DeSeve dalam mengukur keberhasilan kolaborasi menggunakan delapan indikator, yaitu :

1. *Network Structure* (struktur Jaringan)

Struktur jaringan yang dimaksud adalah adanya elemen-elemen yang terkait atau saling berhubungan yang mencerminkan jaringan. *Network* (jaringan) tidak boleh membentuk hirarki karena tidak efektif, dan struktur jaringan mampu bersikap organis dengan struktur organisasi yang se-flat mungkin. Yang di dalamnya tidak ada hirarki kekuasaan, dominasi, serta monopoli. Semuanya harus setara baik itu dalam hal kewajiban, tanggungjawab, otoritas dan peluang

untuk aksesibilitas. Ada tiga bentuk kategori struktur jaringan yaitu : 1) self governance yakni model yang tidak memiliki entitas administrasi namun masing-masing stakeholder ikut berpartisipasi dalam jaringan namun memiliki kelemahan tidak efisien dan pembuatan keputusan yang terdesentralisir, 2) Lead Organization yakni model ini sudah memiliki entitas administrasi serta manajer yang melakukan jaringan sebagai anggota jaringan dan penyedia layanan. Kelebihan model ini efisien dan arah jaringan jelas, namun kelemahannya adanya dominasi dari lead organization dan kurangnya komitmen dari anggota yang bergabung, dan 3) network administrative organization yakni memiliki entitas administrasi dengan tegas untuk mengelolah jaringan namun bukan sebagai penyedia layanan dan manajernya digaji. Model ini merupakan gabungan dari model self governance dan lead organization.

Struktur jaringan pada kolaborasi memiliki tiga bentuk kategori yaitu: 1) self governance pada kolaborasi ini antara lembaga pemerintah yaitu

Dinas Kelautan dan perikanan dan Himpunan Nelayan bersifat semiformal (belum ada kesepakatan/ kontrak tertulis sehingga tidak ada entitas administrasi, namun stakeholder terlibat dan berpartisipasi dalam network. Kenyataan dilapangan belum ada kolaborasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Manokwari dengan himpunan nelayan yang ada. Sedangkan 2) Lead Organization pada kolaborasi Dinas Kelautan dan Perikanan dan PPL berkolaborasi atas dasar Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil. Sehingga terdapat entitas administrasi dalam kolaborasi. Kenyataan yang terjadi PPL dan Dinas Kelautan dan perikanan belum terjalin kolaborasi dalam menjalankan tugasnya di Kabupaten Manokwari. 3) Network Administrative Organization (NAO) pada kolaborasi tidak ada informasi dari informan hal ini karena informan tidak mengetahui mengenai NAO. Hal ini menyebabkan para stakeholder berjalan masing-masing sehingga belum dapat mencerminkan

adanya kolaborasi yang terjalin. Ini juga jelas belum dilaksanakan dengan baik NAO di kabupaten Manokwari, masih adanya ego sektoral yang terjadi.

2. *Commitment to Common Purpose* (Komitmen terhadap tujuan)

Komitmen terhadap tujuan yang dimaksud adalah kerjasama yang mengacu pada alasan sebuah jaringan itu harus ada sebagai upaya pemberdayaan kelompok nelayan bagan. Adanya kolaborasi yang terjalin dalam pemberdayaan kelompok nelayan di Kabupaten Manokwari mengacu pada alasan bahwa pemerintah, kelompok nelayan, LSM dan Organisasi yang terkait yang ikut bertanggungjawab dalam pemberdayaan kelompok nelayan.

Komitmen yang ada dalam kolaborasi setiap lembaga sudah memiliki visi misi yang jelas, dan setiap lembaga juga memiliki komitmen masing-masing dalam memberdayakan kelompok nelayan. Namun dari pihak kelompok nelayan sendiri sebagai aktor yang ingin diberdayakan tidak mengetahui dan memiliki komitmen yang jelas dalam kolaborasi, sehingga dalam hal komitmen

pada kolaborasi belum bisa mewujudkan pemberdayaan terhadap kelompok nelayan.

3. *Trust among the participants* (Adanya saling percaya antara peserta)

Hal ini berkaitan dengan kepercayaan. Dalam sebuah hubungan kolaborasi sangat penting menanamkan rasa kepercayaan dari para stakeholder. Erat kaitannya dengan kolaborasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan, Kelompok Nelayan, LSM dan Organisasi yang terkait yang ikut bertanggungjawab dalam pemberdayaan kelompok nelayan. itu sendiri harus memiliki rasa saling percaya satu sama lain. Terkait kepercayaan pada kolaborasi dalam pemberdayaan kelompok nelayan sudah ada kepercayaan. Para stakeholder membangun kepercayaan masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri, sehingga ada perbedaan pendapat dalam hal membangun kepercayaan pada setiap stakeholder. Maka dari itu kepercayaan dalam kolaborasi belum terjalin dengan baik antara stakeholder.

4. *Governance* (Kejelasan dalam tata kelola)

Kejelasan dalam tata kelola pada kolaborasi meliputi:

- 1) *Boundary and exclusivity* dalam kolaborasi ini masing-masing lembaga memiliki persyaratan dalam perekrutan anggota, namun dari pihak kelompok nelayan sendiri menyatakan tidak ada persyaratan khusus dalam menjadi anggota kelompok nelayan,
- 2) *rules* (aturan-aturan) dalam kolaborasi terdapat aturan terikat dan terikat hal ini tergantung dari kepentingan lembaga masing-masing, namun dari pihak kelompok nelayan kurang mengetahui mengenai aturan dalam kolaborasi.
- 3) *self determination* dalam kolaborasi para stakeholder memberikan kebebasan kepada para nelayan dalam melakukan kerjasama baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Namun dari pihak swasta membangun kerjasama merupakan salah satu hal penting dalam kolaborasi,
- 4) *network management* dalam kolaborasi peneliti mendapatkan beberapa hambatan yang dalam

memberdayakan kelompok nelayan yaitu dari aspek anggaran, aspek inkonsistensi, aspek alam, aspek kebijakan, sektor sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas kemampuan nelayan dalam akses teknologi. Namun dari sudut pandang beberapa informan belum menemukan hambatan. sehingga kolaborasi yang terjalin belum memenuhi aspek kejelasan tata Kelola.

5. *Access to Authority* (Akses terhadap kekuasaan)

Hal ini menunjukkan bahwa dalam kolaborasi penting adanya standar (ukuran) mengenai ketentuan-ketentuan prosedur yang dapat diterima secara luas. Serta perlu memberikan kesan kepada anggota jaringan (network) sebagai otoritas dalam pengimplementasian keputusan. Dalam kolaborasi sudah ada otoritas yang jelas pada masing-masing stakeholder. dengan adanya otoritas yang jelas stakeholder bisa menjalankan peran dan fungsinya masing-masing serta mengimplementasikan keputusan yang sudah ditetapkan.

6. *Distributive Accountability / Responsibility*
(Pembagian Akuntabilitas / Resposibilitas)

Pembagian akuntabilitas/ responsibilitas ini merujuk pada penataan, pengelolaan, dan manajemen yang dilakukan secara bersama-sama dengan stakeholder lainnya. Serta melibatkan seluruh anggota jaringan dalam pembuatan keputusan dan berbagi tanggungjawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Apabilah anggota tidak dilibatkan dalam menentukan tujuan network dan tidak berkeinginan sumber daya dan otoritas ke dalam network, sehingga network gagal mencapai tujuan.

Pertanggungjawaban dalam kolaborasi sudah ada pada masingmasing stakeholder atau lembaga masing-masing. namun disini ada beberapa titik fokus yaitu: pembinaan, pemberdayaan dalam aspek budidaya, serta konsisten dengan kesepakatan kerjasama. Hal tersebut merupakan faktor pendukung dalam memenuhi tanggungjawab dalam kolaborasi untuk mewujudkan pemberdayaan kelompok nelayan.

7. *Information Sharing* (Berbagi Informasi)

Yakni memberikan kemudahan bagi para anggota dalam mengakses informasi, perlindungan privacy (kerahasiaan identitas pribadi seseorang). Dan adanya keterbatasan mengakses bagi yang tidak termasuk dalam anggota sepanjang masih bisa diterima oleh semua pihak yang terkait. Berbagi informasi pada kolaborasi bisa dilakukan dengan melalui musyawarah maupun pertemuan rutin atau persuratan secara formal. Hal ini merupakan sebuah strategi yang dilakukan setiap organisasi dalam penyebaran informasi terhadap anggotanya dalam kolaborasi sehingga mewujudkan pemberdayaan terhadap kelompok nelayan.

8. *Access to resources* (Akses Sumber Daya)

Akses sumber daya yaitu tersedianya Sumber daya manusia, keuangan, teknis serta sarana dan prasarana sebagai pendukung dalam mencapai tujuan jaringan. Akses sumber daya pada kolaborasi pemberdayaan kelompok nelayan masih kurang baik dari segi keuangan, tehnik dan SDM dalam kolaborasi masih kurang. Bantuan sarana

dan prasarana yang ada masih minim, dari sektor SDM spesialis tenaga ahli masih kurang serta dalam pembangunan infrastruktur perikanan. Kenyataan yang terjadi selama ini akses sumber daya belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya SDM yang ada belum pernah diikutsertakan dalam pelatihan teknis dan fungsional. Khusus anggaran yang disediakan juga belum memadai serta daya dukung sarana dan prasarana juga masih terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. (2004). *Sosiologi Pendidikan*. PT. Rineka Cipta.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Anwas, Oos M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Bandjar B.S., Kolopaking M.L., dan Baga M.L. 2013. Strategi Peningkatan Mutu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Pemp) Di Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*. Volume 5. Nomor 1. 2013.
- Baskoro, M.S.dan Suherman, A.A. 2007. *Teknologi Penangkapan Ikan Dengan Cahaya*. Badan Penerbit Univeritas Diponegoro. Semarang.
- Bengkel G., 2018. *Model Pemberdayaan Nelayan Tradisional: Analisis Kemiskinan Nelayan Tradisional Desa Percur Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara*. Disertasi.
- Carpenter, M.A., dan Sanders, G.W. (2009). *Strategic Management: A Dynamic Perspective Concepts*. Pearson Education, Canada.
- Çelik, et, al. (2019). The effects of consumers' FoMo tendencies on impulse buying and the effects of

impulse buying on post-purchase regret: An investigation on retail stores. *BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience*, 10(3), 124-138

Crona BI, Basurto X, Squires D, Gelcich S, Daw TM, Khan A, Havice E, Chomo V, Troell M, Buchary EA, Allison EH. 2016. Towards a Typology of Interactions Between Small-scale Fisheries and Global Seafood Trade. *Marine Policy Journal*. Vol.65. No.1.

Dault, A. 2008. *Pemuda dan Kelautan*. Jakarta. Pustaka Cidesindo.

Deshinta Vibriyanti. (2014). Kondisi Sosial Ekonomi Dan Pemberdayaan Nelayan Tangkap Kota Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal Kependudukan Indonesia* Vol. 9 No. 1

Djumara, N. (2008). Modul 4 Pengembangan Budaya Kerja Aparatur, Diklat Teknis manajemen Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil (Human Resource Management). Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Fargomeli F, 2014. Interaksi Kelompok Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf Hidup Di Desa Tewil Kecamatan Sangaji Kabupaten Halmahera Timur. *Jurnal Acta Diurna* Vol 3. No. 3.

- García AJ, Heinen JT. 2016. Property Relations and the Co-management of Small-scale Fisheries in Costa Rica: Lessons from Marine Areas for Responsible Fishing in the Gulf of Nicoya. *Marine Policy Journal*. Vol.73. No.(1).
- Gray, Barbara, 1989. *Collaborating: Finding common ground formultiparty problems*. San Francisco, CA:Jossey-Bass
- Guyader O, Berthou P, Koutsikopoulos C, Alban F, Demanèche S, Gaspar MB, Eschbaum R, Fahy E, Tully O, Reynal L, Curtil O, Frangoudes K, Maynou F. 2013. *Smallscale Fisheries in Europe: A Comparative Analysis Based on a Selection of Case Studies*. *Fisheries Research Journal*. Volume 140. No.(1)
- Hikmat, A. 2006. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press (HUP).
- Indiradewi A.M.N. dan Marhaeni N.I A.A. 2016. *Evaluasi Program Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan pada Masyarakat Pesisir*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol.9. No.1.
- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Pusat Penelitian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jember Lembaga Penelitian, Universitas Jember.

- Kusnadi. 2002. Konflik Sosial Nelayan Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam. LKiS. . Yogyakarta.
- Langdon SJ. 2015. Foregone Harvests and Neoliberal Policies: Creating Opportunities for Rural, Small-scale, Communitybased Fisheries in Southern Alaskan Coastal Villages. *Marine Policy Journal*. Vol.61. No.1.
- Lestari, E., & Maliki, M. A. (2001). *Negosiasi, Kolaborasi Dan Jejaring Kerja*. Lembaga Administrasi Negara.
- Lindeke, L., Sieckert, A.M. 2005, Nurse-Physician Workplace Collaboration, *Online Journal of Issues in Nursing*.
- Ma'arif, R., Zulkarnain, ., Nugroho, T., & Sulistiono, . (2016). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan melalui Pengembangan Perikanan Tangkap di Desa Majakerta, Indramayu, Jawa Barat. In *Agrokreatif Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 2, Issue 1, p. 17).
- Marlien T. Lopian, Michael Mamentu, Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) “Perkotaan Di Kota Manado , *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum (Ekonomi,Sosial,Budaya, Dan Hukum)*: Vol. 2 No. 2 (2015)
- Muhammad Saidi. 2014. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan (Studi Sistem Bagi Hasil

Perikanan Di Wilayah Madura). Jurnal Untag Surabaya. Vol.10. No.1.

Mulyadi, S. 2007. Ekonomi Kelautan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Mulyadi. 2005. Ekonomi Kelautan. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Mulyono. 1986. Alat-alat Penangkapan Ikan - Buku I: Macam-macam Pancing, Perangkap, Jaring Angkat. Dinas Perikanan Produksi Daerah Tk. I Jawa Tengah.

Nawawi, Hadari. 1984. Administrasi Pendidikan. Jakarta : Gunung Agug. (hlm.7)

Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1 dan 2. Jakarta. Rineka Cipta.

Nikijuluw, P.H.V. 2002. Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan. P3R. Jakarta. Pustaka Cidesindo.

Nugraha, H. 2014. Model Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja Perikanan Tangkap di Pantai Utara Jawa Barat (Aplikasi Persamaan Simultan Harga dan Upah) Jurnal SMART.Vol. XI. No1.

O'Leary, R., Van Slyke, D.M., & Kim, S. (2010). The future of public administration around the world. Washinton DC: Georgetown University Press.

- Pomeroy R. 2016. A Research Framework for Traditional Fisheries: Revisited. *Marine Policy Journal*. Vol. 70. No. 1.
- Pratikno. (2007). Governance dan Krisis Teori Organisasi. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 11(2), 121-138
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan
- Sasmita S. 1997. Studi tentang Bagan Motor dan Kemungkinan Pengembangannya di Desa Mekarsari Kecamatan Pulo Merak Kabupaten Serang. [Skripsi] (tidak dipublikasikan). Bogor: Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.
- Satria, Arif. 2015. Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. Jakarta. Yayasan Pustaka Obor. Indonesia.
- Satria, Arif. 2001. Dinamika Modernisasi Perikanan : Formasi Sosial dan Mobilitas Nelayan. Bandung. Humaniora Utama Press.
- Sembiring M., 2015, "Mengenal Karakteristik Perikanan Tangkap Skala Kecil". Artikel Penyuluh Perikanan

Muda, Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat

Setiawan I, Monintja DR., Nikijuluw VPH, dan Sondita MFA. 2007. Analisis Ketergantungan Daerah Perikanan sebagai Dasar Pelaksanaan Program Pemberdayaan Nelayan: Studi Kasus di Kabupaten Cirebon dan Indramayu. Buletin PSP.

Sipahelut, Michael. 2010. Analisis pemberdayaan masyarakat nelayan di kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Tesis. IPB Bogor.

Smith. I.R. 1983. A Research Framework for Traditional Fisheries. ICLARM Studies and Reviews.2:40p

Subagiana M.G.I, Artatanaya L.G.I., dan Wijayati M.L.N. 2018. Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada Tiga Perkampungan Nelayan Air Kuning, Pengambengan dan Candi Kusuma Kabupaten Jembrana Propinsi Bali. Jurnal Bisni dan Kewirausahaan. Vol.14.No. 2.

Subani, W. 1970. Alat Dan Cara Penangkapan Ikan Di Indonesia. Lembaga Penelitian Perikanan Laut Jakarta.

Subani, A. 1983. Penggunaan Lampu sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan. Laporan Penelitian Perikanan Laut. No. 27. Balai Penelitian Perikanan Laut. Departemen Pertanian. Jakarta.

- Subani,W., dan Barus HR. 1989. Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut di Indonesia. Jurnal Penelitian Perikanan Laut No. 50 tahun 1988 (Edisi Khusus). Departemen Kelautan dan Perikanan, Balai Penelitian dan Perikanan Laut. Jakarta. Vol. 11.
- Sudirman dan A. Mallawa. 2012. Teknik Penangkapan Ikan. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Sudirman dan M.N.Nessa. 2011. Perikanan Bagan dan Aspek Pengelolaannya. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Suharto, Edi. 2017. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Bandung. Refika Aditama.
- Suharto, Edi. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung. Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Bandung. Refika Aditama.
- Sulaiman H, Mulyono SB, Taurusman AA, Wisudo SH dan Roza Y. 2015. Tingkah Laku Ikan pada Perikanan Bagan Petepete yang Menggunakan Lampu Led. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis 7(1)
- Syafrini Delmira, 2014. Nelayan Vs Rentenir Studi Ketergantungan Nelayan terhadap Rentenir pada

masyarakat pesisir. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan. Sumbar.2014.

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004. Tentang Perikanan.

Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2016. Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, pembudidaya, dan Petambak Garam.

Wantah Edwin. 2017. Pemberdayaan Nelayan Berbasis Pendidikan Ekonomi dan Potensi Pesisir Di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Teori dan Praksis Pembelajaran IPS. Volume 2 Nomor 2. Universitas Malang. 2017.

Waris, I., Susanti A., Kornelius Y., dan Putra A.H. 2017. Studi Tentang Strategi Pemberdayaan Nelayan Di Pesisir Pantai Teluk Tomini Dalam Upaya Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Parigi Moutong.

Wood, Donna J dan Barbara Gray.1991. Towards a Comprehensive Theory of Collaboration. Journal of Applied Behavioral Science. Vol.27, halaman 139-162

Zubaedi, 2013. Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.2013.

PROFIL PENULIS



Dr (c) Richard Steven Patty, S.STP, MM.
**Analisis Tata Praja Pada Dinas Koperasi,
UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Papua Barat Daya**

Richard Steven Patty, S.STP, MM sebagai Analis Tata Praja pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan perdagangan Provinsi Papua Barat Daya. Menyelesaikan studi Diploma IV di STPDN Jatinangor tahun 2000, sedangkan menyelesaikan Magister pada Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia, STIE ABI Surabaya tahun 2009. Selain Sebagai PNS dilingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga sebagai tenaga pengajar/Fasilitator untuk pelatihan Kompetensi Manajerial, pelatihan kompetensi Teknis/Fungsional dan kompetensi Pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, selain itu juga bertindak sebagai tenaga Assesor pejabat strategis Pemerintahan dilingkup Pemerintah Daerah, sebagai konsultan Pemerintahan. Pernah menduduki Jabatan sebagai Kepala Bidang PLL & Bagi Hasil pada Dispenda Prov. Papua Barat (2007-2013). Pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi pada Biro Perlengkapan Setda Prov. Papua Barat (2013-2015). Pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Data dan Informasi pada BNP Papua Barat (2015-2016) dan pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pencegahan pada BNP Papua Barat (2016-2017). Pernah menjabat sebagai tenaga fungsional Widyaiswara Ahli Muda Provinsi Papua Barat (2017-2020) dan pernah juga menjabat Widyaiswara Ahli Madya di Provinsi Papua Barat (2020-2023). Pernah menjadi tenaga pengajar pada Program Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat-Wahana Visi Indonesia Project - USAID (2021-2023). Pernah diangkat sebagai Tenaga

Penyuluh Pertama Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (2023-sekarang). Publikasi internasional diantaranya Size Distribution and Growth Pattern of Mackepel Scad (*Decapterus Sp.*) Caught by Boat Lift Nets in Doreri Bay Waters, Manokwari Regency, West Papua, Indonesia and its Management Implications. Penulis buku, diantaranya Pengembangan Kualitas Inovasi (2018), Peran Strategis Mentor Membentuk PNS Profesional (2021), Strategis Pengembangan ASN Dalam Kualitas Inovasi Layanan Publik (2022) dll.

PROFIL PENULIS



Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si.
Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat

Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si. sebagai guru besar dalam ilmu kelautan (bidang pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut). Menyelesaikan studi doktor pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor tahun 2012. Sebagai staf dosen pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Papua (UNIPA). Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Lingkungan. Sebagai pengajar pada FPIK dan Pascasarjana Program Magister Sumber Daya Akuatik, Magister dan Doktor Ilmu Lingkungan. Pernah menjadi Manajer Program Lapangan, Coastal Resources Management Project - USAID (2003-2004). Makalah telah dipresentasikan pada berbagai forum internasional (International Coral Reef Symposium, New Guinea Biological Conference, Ecosystem Fishery Based Management, dll) dan nasional (Konas pesisir, Munas terumbu karang, ISOI, dll). Penulis buku, diantaranya tata Kelola Kawasan Konservasi Laut, Sumberdaya Perikanan Laut Sorong Selatan, Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat, Orang Asli Papua dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Konservasi, Pengelolaan Perikanan Teluk Wondama, dll. Korespondensi: r.bawole@unipa.ac.id. ***

BIODATA PENULIS



Prof. Dr. Ir. Ridwan Sala, M.Si.
Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat

Prof. Dr. Ir. Ridwan Sala, M.Si. sebagai dosen pada jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Papua, dengan bidang keahlian pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan. Menyelesaikan studi doktor di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2018. Selain sebagai staf dosen pada program Sarjana (S1), juga mengajar pada program S2 Sumber Daya Akuatik, program S2 Ilmu Lingkungan dan program S3 Ilmu Lingkungan. Saat ini menjabat Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Papua. Topik penelitian yang pernah dilakukan umumnya terfokus pada aspek pemanfaatan sumber daya perikanan, model pengelolaan perikanan tangkap, dan pengelolaan sumber daya perikanan. Selain sebagai dosen, sejak tahun 2019 sampai sekarang menjadi anggota Komisi Nasional Pengkajian Stok Ikan. Beberapa buku yang sudah ditulis adalah Pengelolaan Perikanan Teluk Wondama (2020), Sumberdaya Perikanan Laut Sorong Selatan (2021), Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Papua (2022), Ekobiologi Ikan. Persebaran dan Keanekaragaman Ikan (2022), Sumber Daya Perairan Papua. Fakta dan Prospek (2023). Selain itu, berbagai publikasi ilmiah telah dipublikasikan pada jurnal ilmiah internasional bereputasi dan jurnal ilmiah nasional. Korespondensi: r.sala@unipa.ac.id.***

BIODATA PENULIS



Dr. Ir. Ihwan Tjolle, MP
Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
Faperta
Universitas Papua, Manokwari, Papua
Barat

Dr. Ir. Ihwan Tjolle, MP. sebagai dosen pada jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Papua, dengan bidang keahlian pembangunan pertanian. Menyelesaikan studi doktor di Universitas Padjadjaran pada tahun 2011. Selain sebagai staf dosen pada program Sarjana (S1), juga mengajar pada program S2 Ilmu pertanian, program S2 Ilmu Lingkungan dan program S3 Ilmu Lingkungan. Saat ini menjabat sebagai sekretaris Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Papua. Topik penelitian terkait dibidang pembangunan pertanian orang asli papua, pemberdayaan masyarakat dan kajian-kajian lingkungan. Pada bidang lingkungan aktif dalam penyusunan dokumen lingkungan dan perencanaan (UKL-UPL, Amdal, KLHS, RTRW, RPJMD), juga sejak 2019 hingga sekarang tergabung dalam Komisi Penilai Amdal (KPA) Provinsi Papua Barat. Beberapa penelitian antara lain Studi Potensi dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan dan Pertanian di Kawasan Teluk Bintuni (2002), Studi Perikanan Berkelanjutan di Kawasan Teluk Bintuni dan Berau di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua (2004), Penyusunan Model Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Asli Papua di Provinsi Papua barat (2013), publikasi internasional diantaranya Development of the sustainable human development index model in West Papua, Penulis buku diantaranya Pembangunan Pertanian berkelanjutan di Papua. Korespondensi: ihwantj@gmail.com.

STRATEGI KOLABORASI DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN

Wilayah pesisir memang merupakan wilayah yang dinamis, sangat strategis dan mempunyai potensi besar bagi pengembangan berbagai sektor perekonomian khususnya sektor perikanan. Apabila sumber daya perikanan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal maka akan memberikan potensi ekonomi yang menjanjikan bagi masa depan masyarakat Indonesia. Collaborative governance merupakan cara pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung stakeholder diluar negara, berorientasi konsensus dan musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan publik serta program-program public. Fokus dari pada collaborative governance ada pada kebijakan dan masalah publik. Institusi publik memang memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, tujuan dan proses kolaborasi adalah mencapai drajat konsensus diantara para stakeholder.



Penerbit
PT. Radja Intercontinental Publishing
Jl. Cempaka Putih, Sp. Tiga Blang Rayeuk,
Dsn. Angsana, Kota Lhokseumawe

www.radjapublika.org
<https://radjapustaka.com>

ISBN 978-623-89138-1-7

